



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN  
RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi  
Strata 1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**SITRI SONIATI**

**11775200061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

**Oleh: Sitri Soniati**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Kampar Hulu khususnya di Desa Bandur Picak dan Desa Pongkai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai acuan penelitian. Pelaksanaan bantuan ini perlu dilaksanakan secara swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Hasil penelitian dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 kegiatan dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu, keterbatasan swadaya masyarakat, penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia (lansia), tiingkat pendidikan yang tergolong rendah, dan adanya program lain

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : SITRI SONIATI  
**NIM** : 11775200061  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL  
**JUDUL** : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN  
 STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI  
 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI  
 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Disetujui Oleh

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**WAKIL DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS. SE, M. Si. AK.CA**  
 NIP. 19751112 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**  
 Administrasi Negara

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : SITRI SONIATI  
**NIM** : 11775200061  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL  
**JUDUL** : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN  
 STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI  
 MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI  
 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Disetujui Oleh

**KETUA PENGUJI**

Dr. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

Dr. John Afrizal, S. HI, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003

**PENGUJI II**

Ikhwan Ratna, SE., M. Si  
NIP. 19830827 201101 2 014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih kepada Yth:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Teristimewa Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Wartiningsih dan Ayahanda Bapak Muskhlis terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini.
2. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. H. Muh. Said HM., M.Ag, MM.
4. Wakil Dekan I Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., SE, M.Si, Ak. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Wakil Dekan II Dr. Julina, S.E., M. Si. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Wakil Dekan III Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si.
8. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
9. Keluarga Besar Pemerintah Desa Bandur Picak dan Pemerintah Desa Pongkai.
10. Pembimbing Akademik Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M. KP.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dosen Pembimbing Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si.

Ibu Abdiana Ilosa, S.AP.,M.AP (Manda), yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

Dosen serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara.

Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta semua pegawai terimakasih atas pelayanan serta kelengkapan buku dengan baik, sehingga mempermudah peneliti dalam menuliskan skripsi.

Pekanbaru, April 2021  
Penulis

**SITRI SONIATI**  
**NIM. 11775200061**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Batasan Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS</b>	
2.1 Pelaksanaan Kebijakan.....	15
2.2 Pembangunan .....	21
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2.4 Kemiskinan .....	24
2.5 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah .....	26
2.6 Pandangan Islam tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Miskin).....	39
2.7 Kajian Terdahulu.....	43
2.8 Definisi Konsep.....	45
2.9 Kerangka Pemikiran.....	47



2.10 Definisi Operasional .....	48
---------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.3 Metode Pengumpulan data .....	50
3.4 Informan Penelitian .....	52
3.5 Metode Analisa .....	53

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Desa Bandur Picak .....	55
4.1.1 Sejarah Desa .....	55
4.1.2 Demografi .....	57
4.1.3 Keadaan Sosial .....	58
4.1.4 Keadaan Ekonomi .....	59
4.1.5 Kondisi Pemeritahan Desa .....	59
4.2 Desa Pongkai .....	68
4.2.1 Sejarah Desa .....	68
4.2.2 Demografi .....	69
4.2.3 Keadaan Sosial .....	70
4.2.4 Keadaan Ekonomi .....	71
4.2.5 Kondisi Pemeritahan Desa .....	71

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	80
5.1.1 Swadaya Masyarakat .....	80
5.1.2 Pemberdayaan Masyarakat .....	86
5.1.3 Transparan .....	100

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

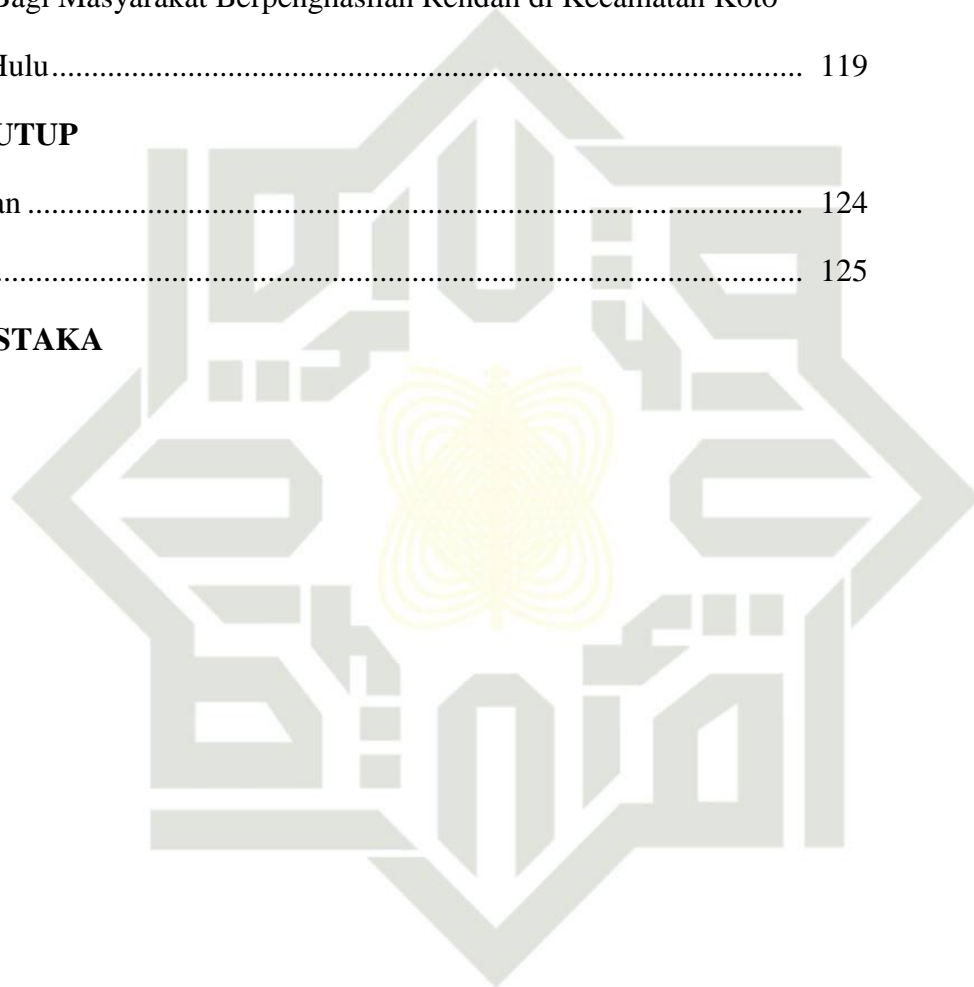
5.1.4 Dapat Dipertanggungjawabkan .....	104
5.1.5 Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan .....	111
5 Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi MBR di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	115
5 Pembahasan dan Kendala Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	119

**BAB VI PENUTUP**

6 Kesimpulan .....	124
6 Saran .....	125

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Karangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Kantor Kepala Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	67
Gambar 4.2 Bagan Organisasi Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Kampar Hulu.....	79



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	9
Tabel 1.2 Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	9
Tabel 1.3 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	10
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	43
Tabel 2.2 Definisi Konsep.....	45
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	52
Tabel 3.2 Key Informan .....	52
Tabel 4.1 Data Lembaga Pemerintah Desa Bandur Picak .....	60
Tabel 4.2 Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Bandur Picak.....	60
Tabel 4.3 Data Lembaga Pemerintah Desa Pongkai.....	72
Tabel 4.4 Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Pongkai .....	72

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dianggap lebih baik. Konsep pembangunan memiliki hubungan erat dengan nilai, strategi dan indikator serta menjadi domain setiap negara berkembang. Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat secara tuntas (Sudjana, 2006: 52). Negara memiliki peranan besar dalam hal ini .

Peran Negara mencakup upaya untuk menggali segala sumber daya seperti pajak, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. negara berkewajiban membuat kebijakan atau Undang-Undang untuk mengatur warga negara serta mengelola barang publik, negara menyediakan anggaran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Wujud nyata kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga Negara (Scharto, 2007: 11).

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan pengejawantahan diri manusia, baik untuk pribadi maupun untuk suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang, karena setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal/rumah, serta mendapatkan



lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relative masih besar. Permasalahan tersebut terjadi karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas dan terselesaikan. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa kendala mulai dari mahalnnya harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalnnya upah tukang.

Kendala yang dialami oleh Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat dengan (MBR), hal ini dikarenakan mereka hanya memiliki penghasilan dibawah rata-rata atau tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh sebab itu MBR di Indonesia perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam kebijakan yang berkaitan dengan MBR.

Kriteria dari Masyarakat berpenghasilan Rendah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2019 pasal 5 tentang Batas Penghasilan Masyarakat berpenghasilan Rendah yaitu sebagai berikut:

1. Batas penghasilan rumah tangga MBR, yang merupakan nilai penghasilan rumah tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Batas penghasilan rumah tangga MBR ditetapkan oleh Menteri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Batas penghasilan rumah tangga MBR berlaku sesuai dengan lokasi perolehan rumah.

Saat ini jumlah MBR di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang tergolong kedalam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan pendataan jumlah rumah yang tidak layak huni di Indonesia mencapai 2,3 juta rumah. Keadaan rumah rusak ringan sampai dengan rumah rusak berat. Untuk daerah-daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni saat sekarang ini sebarannya merata.

Rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh daerah-daerah di Indonesia disebabkan karena adanya faktor ledakan penduduk, dalam dasawarsa yang terakhir ini menimbulkan masalah-masalah yang akan dicarikan solusinya dalam penyelesaiannya, diantara masalah-masalah tersebut adalah adanya masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah di beberapa daerah, oleh karena itu perlu adanya penyelesaiannya salah satu caranya yaitu dengan mempergunakan sarana hukum.

Adapun indikator Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

- 1) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
- 2) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV;
- 3) Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
- 4) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
- 5) Rusak berat; dan/ atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Faktor lainnya adalah terkait tentang keterjangkauan daya beli masyarakat, dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu ikut memecahkan masalah keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dianggap serta dipandang tidak cakap serta tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat, dan dari segi sosial dan pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah cenderung terjadinya perilaku menyimpang, ini juga diperkuat oleh pola kehidupan kota yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman pemerintah pusat berperan melaksanakan pembinaan, dan memiliki tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam hal ini bukan hanya pemerintah pusat berperan sebagai pelaksana pemberian ataupun penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, namun pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembinaan juga mempunyai tugas yaitu melaksanakan kebijakan dan strategi bagi tingkat kabupaten/kota, melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman pada tingkat kabupaten/kota serta sampai pada kecamatan dan masuk kedesa-desa, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Salah satu kebijakan nasional dalam menghadapi permasalahan perumahan dan pemukiman tersebut, pemerintah menetapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong serta meningkatkan keswadayaan dalam meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta sarana, prasarana dan utilitas umum. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat yang tidak mampu dan memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.

Jenis kegiatan BSPS ini terbagi menjadi dua yakni berupa Pembangunan Baru (PB) dengan klasifikasi pembangunan baru pengganti rumah tidak layak huni. Selain pembangunan rumah baru juga ada Peningkatan Kualitas (PK) dengan klasifikasi kerusakan rumah ringan, sedang dan berat. Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 30 juta untuk Pembangunan Baru Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas, tergantung kondisi rumah warga yang mendapatkan bantuan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/kelurahan. Dalam pengelolaannya melibatkan kelompok masyarakat setempat. Adapun pemberian bantuan dan kegiatan yang ada pada program ini bertujuan untuk meringankan serta meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dalam memiliki rumah layak huni.

Adapun yang menjadi fokus dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan oleh pemerintah, yaitu rumah yang selesai tepat waktu dalam pengerjaannya serta tidak ada lagi rumah yang terbengkalai yang mengakibatkan rumah tersebut tidak selesai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki slogan terkait pelaksanaan BSPS, yaitu “Atadin” (Atap, lantai, Dinding). Hal ini ditegaskan karena pemerintah sangat peduli akan kebutuhan dasar atau pun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, masih ada sekitar 1,9 juta rumah tidak layak huni. Rumah yang terealisasi yaitu sekitar 206.500 unit per tahun, dengan anggaran Rp 4,28 triliun yang berasal dari ABPN. Pemerintahan terus berupaya untuk mengurangi rumah tidak layak huni yakni dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). (Berita Tanggal 12 Januari 2019 10:26 WIB, yang Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pupr-menarget-jumlah-rumah-tak-layak-huni-di2019-hanya-1-9-juta-1547259057487265439>, pada Hari Rabu, 8 April, Pukul 13:47 WIB).

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari kementrian Sosial;
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah, atau memiliki atau menghuni rumah tidak layak huni
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BPS

8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BPS, dan

9. Dapat bekerja secara kelompok.

Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bersumber dari APBN. Dana yang dialokasikan untuk BPS baik untuk peningkatan kualitas atau untuk pembangunan baru yaitu berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dimana dari dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk material untuk membangun rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS).

Untuk melaksanakan program BPS Kementerian PUPR akan menyerahkan penyelenggaraan program kepada Dinas bagian perumahan di setiap Provinsi yang akan menerima usulan dari Desa/Kelurahan sebagai calon lokasi BPS dari Bupati/Walikota, berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- Jumlah RTLH di Desa/Kelurahan
- Jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan

Setelah mendapatkan usulan dari Bupati/Walikota, tahap berikutnya Dinas Provinsi bagian Perumahan akan melakukan verifikasi terhadap usulan Bupati/Walikota, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota



2. Jumlah RTLH Kabupaten/Kota
3. Jumlah kekurangan rumah di Kabupaten/kota
4. Kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perumahan.

Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Indonesia. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan luas wilayah yaitu 674,00 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 18.939 jiwa. Wilayahnya meliputi 6 Desa, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2019 melalui Kementerian Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya menetapkan Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kecamatan Koto Kampar Hulu masih mengalami permasalahan kemiskinan diakibatkan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Akibat rendahnya penghasilan masyarakat berdampak pada kualitas rumah yang dihuni oleh masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Berdasarkan data Dari Badan Statistik Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tahun 2019, dari jumlah penduduk yaitu sekitar 18. 939 jiwa, sedangkan angka kemiskinan Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebanyak 1.780 jiwa/keluarga. dari data tersebut masih begitu banyak masyarakat yang masih tergolong dibawah garis kemiskinan dan ini perlu menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah tabel jumlah keluarga miskin di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Koto Kampar hulu**

No	Desa	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Bandur Picak	318
2	Gunung Malelo	331
3	Pongkai	135
4	Sibiruang	150
5	Tabing	226
6	Tanjung	620
<b>Total</b>		<b>1.780</b>

Sumber: Kantor Desa Kecamatan Koto Kampar Hulu 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya jumlah keluarga miskin Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tahun 2019 yaitu berjumlah 1.780 keluarga yang berada di 6 Desa. Jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat di Desa Tanjung yaitu sebanyak 620 keluarga. Permasalahan yang dialami Kecamatan Koto Kampar Hulu tidak hanya kemiskinan saja akan tetapi juga menghadapi masalah rumah tidak layak huni, ini terjadi karena rendahnya daya beli masyarakat khususnya pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi segala kebutuhan rumahnya. Berikut adalah data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**Tabel 1.2**

**Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Desa	Jumlah
1	Bandur Picak	152
2	Gunung Malelo	98
3	Pongkai	105
4	Sibiruang	50
5	Tabing	54
6	Tanjung	80
<b>Total</b>		<b>539</b>

Sumber: Kantor Desa Kecamatan Koto Kampar Hulu 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya jumlah rumah tidak layak huni yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu berjumlah 539 yang tersebar di 6 Desa. Jumlah rumah tidak layak huni terbanyak terdapat di Desa Bandur Picak yaitu berjumlah 152 rumah. Kecamatan Koto Kampar Hulu masih mengalami pemasalahan terkait Rumah Tidak Layak Huni, yang dapat dikatakan cukup besar, padahal Pemerintah sudah melakukan perbaikan namun belum telaksana terseber keseluruh Indonesia, khususnya di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu Kecamatan sebagai penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 2 Desa yaitu Desa Bandur Picak dan Desa Pongkai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Koto Kamapr Hulu Tahun 2019**

No	Desa	Target	Realisasi
	Bandur Picak	152	52
	Pongkai	105	32
<b>Total</b>		<b>257</b>	<b>84</b>

Sumber: Kantor Desa Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target yang diajukan oleh aparat Desa kepada pemerintah daerah itu sebanyak 257 rumah dan yang terealisasi hanya 84 rumah, dua Desa sebagai penerima bantuan BSPS di Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa Bandur picak 52 rumah dan Desa Pongkai 32 rumah. Pada program ini pemerintah memberikan bantuan berupa bahan bangunan. Pada desa Bandur Picak dan desa Pongkai, dari rumah yang diajukan oleh aparat desa kepada pemerintah daerah masih begitu banyak yang



belum terealisasi. Masih banyak rumah warga yang belum menerima BSPS, padahal mereka tergolong masyarakat dengan ekonomi rendah ataupun masyarakat MBR.

Sebagai program yang dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program BSPS di Kecamatan Koto Kampar Hulu dapat dikatakan belum baik dalam pelaksanaannya, karena belum meratanya penerimaan bantuan BSPS yang belum tersentuh program BSPS. Sejauh ini baru Desa Bandur picak dan Desa Pongkai yang menerima program BSPS, sementara masih banyak Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Desa Tanjung, Desa Gunung Malelo, Desa Tabing dan Desa Sibiruang. Dari data rumah tidak layak huni yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu juga masih banyak Desa yang belum sebagai penerima BSPS seperti Desa Gunung Malelo yaitu sebanyak 98 rumah. Kemudian dari data diatas penerima BSPS di Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu berjumlah 84, hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana target penerima bantuan berjumlah 257.

Jenis kegiatan BSPS yang diberikan dari Kementrian yaitu Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) rumah bagi MBR. Namun yang terlaksana di Kecamatan Koto Kampar Hulu khususnya di desa bandur Picak dan Desa Pongkai yaitu Peningkatan Kualitas (PK) dengan dana yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 15 juta.

Desa Bandur Picak dan Desa Pongkai sebagai penerima BSPS merasa dilemma dikarenakan masih terdapat warga yang belum mampu untuk melakukan swadaya dalam menyiapkan dana dan tenaga ahli dalam melakukan pembagunan rumah dan untuk membayar gaji para tukang serta membeli bahan material disaat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





material yang diberikan oleh pemerintah kurang memadai, karena masyarakat sebagai penerima BSPS merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan masalah-masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu**”.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah.

1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari Penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan koto kampar hulu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah serta untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan di fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

##### 2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran serta sebagai masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

##### 3. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya dengan jenis penelitian yang sama tentang efektivitas pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

#### 1.5 Batasan Penelitian

1. Pada Analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2. Penelitian ini dilakukan di kantor desa sebagai penerima bantuan BSPS kecamatan koto kampar hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan pada penelitian yang dibahas pada masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

### BAB I

#### :PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### BAB II

#### :LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dikajian terdahulu. Pandangan islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau konsep operasional atau definisi konsep atau variabel penelitian atau hipotesis.

### BAB III

#### :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2012:146)

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:135) mengemukakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melakukan aktifitasnya pemerintah melakukan dua macam tindakan, yaitu tindakan biasa (*feitelijkehandeligen*) dan tindakan hokum (*rechtshandeli-ngen*).

Dalam kajian hokum , yang terpenting dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, *rechtshandelingen*. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintah atau pun pejabat-pejabat dalam pembuatan kebijakan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah (*bertuurs-organen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
3. Perbuatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014: 135) mengatatakan bahwa:

“Implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian utama implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Kemudian menurut Riplay dan Fraklin dalam Winarno (2008:145) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah”.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Van Horn sebagaimana yang disebut dengan a Model of the Policy Implementation. Dalam teori ini ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realisits dengan sosial-kultur yang mengadakan pada level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal, (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terbantu dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya financial dan sumber daya waktu. Ketiga sumber daya ini akan saling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

## 4. Sikap / Kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan “Dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016:136) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas, yaitu:

- Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten ( untuk diterapkan dan dijalankan).

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan.

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf atau sumber daya manusia, informasi, wewenang , dan fasilitas. Tanpa adanya fasilitas maka implementasi tidak akan berhasil.

## 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah efek disposisi, pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy), dan insentif.

## 4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah lebih baik adalah:

- a. Membuat SOP yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab dan berbagai aktivitas, kegiatan, atau kegiatan pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya ada tiga hal, yaitu: adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas pencapaian tujuan, serta adanya hasil dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis mewujudkan tujuan yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan secara terarah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya akan mewujudkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

## 2.2 Pembangunan

Upaya-upaya untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya pembangunan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Mardikanto, 2009) :

“Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.”

Menurut Katz” Dalam Yuwono, 2001: 47” Mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih menilai “pada umum nya tujuan - tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa nasional building atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan





yang telah diancangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam teori struktural fungsional, Parson (1851) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam adaptasi terhadap kebutuhan situasional, pencapaian tujuan, integrasi atau pengaturan tata hubungan, pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial-budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sumodiningrat, 2009 : 62).

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan, tidak cukup dengan hanya upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu: akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan. (Wijaya: 2004:169-170)

Adapun Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- c. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Hikmat, 2001 : 56).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses partisipatif. Program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Penerima manfaat program pemberdayaan adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang semakin terbatas.

## 2.4 Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga kemiskinan dapat didefinisikan suatu kondisi serba kekurangan. Kemiskinan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) juga dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan



disebabkan yang oleh tingkat pendapatan rendah sehingga mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Supriatna (1997:90) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235).

Senada dengan pendapat diatas Soetrisno (2001:19) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Ukuran kemiskinan yang paling mudah ialah diukur dengan tingkat pendapatan dan tingkat konsumsinya. Seseorang dengan kondisi tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatan tidak cukup

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



untuk memenuhi kebutuhan minimum maka dapat dikatakan miskin secara absolut.

Sedangkan Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

## 2.5 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi pelaksanaan program sebagai, “Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006:72) juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program adalah suatu pengerjaan rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum, sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dari program tersebut.

Adapun definisi program yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatrakan bahwa:

“Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Dalam pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil , kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau *Outcomems*. Karena dalam proses tersebut turut terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumberdaya yang dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima BSPS yaitu masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pengertian Stimulan menurut peraturan menteri PUPR Nomor 7 tahun 2018 tentang bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, merupakan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, oleh karena itu diperlukan bantuan stiumulan rumah swadaya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Pemukiman.

Adapun Rumah Swadaya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Pemukiman, merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Terdapat beberapa ciri-ciri rumah swadaya yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah
2. Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan sendiri, bila diperlukan baru memakai jasa tukang
3. Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri
4. Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah pusat dibawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



layak huni di atas tanah matang. Sedangkan Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

Adapun yang menjadi fokus dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pada rumah yang selesai tepat waktu dalam pengerjaannya serta tidak ada lagi rumah yang terbengkalai yang mengakibatkan rumah tersebut tidak selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan karena pemerintah sangat peduli akan kebutuhan dasar atau pun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dasar Hukum Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Landasan utama penyaluran BSPS adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) Subsidi perolehan rumah; b) Stimulan rumah swadaya; c) Peralatan, sarana, dan utilitas umum.

Selanjutnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 tahun 2018 tentang bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Maksud Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun sendiri rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Swadaya Masyarakat

Inisiatif dan upaya masyarakat baik secara sendiri atau berkelompok dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan, Syarif Kasim Riau

b. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

c. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

d. Dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik sebagai penerima bantuan atau tidak sebagai penerima bantuan.

e. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga pasca konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berikut ini terdapat beberapa kriteria bantuan menurut Peraturan Menteri Perumahan No.

6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, yakni:

1. Kriteria Penerima Bantuan:

1) Warga negara Indonesia;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- 3) Sudah berkeluarga;
- 4) Memiliki atau menguasai tanah;
- 5) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- 6) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- 7) Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
  - a. Memiliki tabungan bahan bangunan;
  - b. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
  - c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS;
  - d. Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.
  - e. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
  - f. Dapat bekerja secara kelompok.

2. Kriteria Objek Bantuan adalah

- 1) Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
  - a. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
  - b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
  - c. Tidak dalam status sengketa, dan
  - d. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
- 2) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi);
- 3) Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
- 4) Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.



3. Indikator Rumah Tidak Layak Huni adalah:

- 6) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
- 7) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV;
- 8) Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
- 9) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
- 10) Rusak berat; dan/ atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak
- 11) Mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi).

Alur proses program BSPS yang diberikan kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan oleh pemohon
2. Verifikasi bank pelaksana
3. Pengujian oleh Satker
4. Penetapan penerima manfaat dan Satker
5. Akad kredit
6. Pencairan bantuan
7. Penerima manfaat menempati rumah

Selain alur proses program BSPS terdapat juga Tahapan Penyelenggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah ditetapkan di dalam Pentunjuk Teknis (Juknis), yaitu sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1. Tahapan Persiapan

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a) Penetapan lokasi, diseleksi langsung oleh Gubernur, Bupati/ Walikkota terkait penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- b) Verifikasi usulan, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Ditjen Penyaluran Perumahan
- c) Penetapan lokasi, diseleksi langsung oleh menteri PUPR dan Ditjen Penyaluran Perumahan
- d) Penyiapan Masyarakat, seleksi bank/ pos penyalur, pembentukan tim Teknis yang berasal dari Kabupaten/ Kota, penunjukan Korfas dan TFL serta pendampingan masyarakat
- e) SK PPK, penetapan calon penerima bantuan

## 2. Tahapan Pelaksanaan

- a) Pencairan Bantuan, dilaksanakan oleh pendamping dari masing-masing daerah yang telah ditunjuk
- b) Penyaluran Bantuan, dilaksanakan oleh pendamping dari masing-masing daerah yang telah ditunjuk

## 3. Tahapan Pemanfaatan Bantuan

- a) Pemanfaatan Bantuan Tahap I, dilaksanakan oleh pendamping
- b) LPD Tahap I, dilaksanakan oleh Pendamping
- c) Pemanfaatan Bantuan Tahap II, di damping oleh pendamping
- d) LPDP Tahap II, dilaksanakan oleh pendamping

Dalam pelaksanaan BPS pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan program BPS, dalam pelaksanaan program tersebut terdapat tindakan-tindakan pemerintah untuk terlaksananya pembangunan rumah layak huni bagi MBR yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdapat di dalam Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Persiapan

##### 1) Persiapan bagi Masyarakat

- a. Sosialisasi
- b. Verifikasi calon penerima Bantuan (CPB)
- c. Kesepakatan dari CPB
- d. Mengidentifikasi Kebutuhan Masyarakat

##### 2) Perencanaan

- a. Penyusunan proposal

#### 2. Pelaksanaan

##### 1) Kontruksi

- a. Memberikan bimbingan teknis
- b. Menjelaskan teknik kontruksi
- c. Menjamin kualitas bangunan

##### 2) Pengawasan

- a. Pemantauan pelaksanaan kontruksi oleh sesama anggota Keluarga Penerima Bantuan (KPB)

##### 3) Pelaporan

- a. Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan
- b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan

#### 3. Paska Kegiatan

##### 1) Pengembangan Mandiri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memberikan bimbingan Teknis dan Supervisi dalam:

- a. Pemanfaatan
- b. Pemeliharaan
- c. Pengembangan hasil kegiatan

Adapun yang menjadi aktor di dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya yang terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan swadayaBSPS, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (Menteri PUPR)
2. Ditjen Penyalur Perumahan Pusat
3. Pemerintah Provinsi
4. Ditjen Penyalur Perumahan Daerah
5. Gubernur/ Walikota
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
8. Satuan Kerja (Satker)
9. Tenaga Fasilitator
10. Ban/ Pos Penyalur
11. Pendampingan Masyarakat dari daerah Kabupaten/ kota
12. Masyarakat Sebagai Penerima Bantuan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terdapat dalam Peraturan Menteri PUPR Pasal 1 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam pemberian bantuan perumahan yang di khususkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yaitu sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Rumah Layak Huni, makasud dari layak huni disini yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan
2. Rumah yang Sehat, yaitu bangunan tempat tinggal yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembungan sampah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah.
3. Rumah yang Aman, maksud dari rumah aman yaitu tempat berlindungnya masyarakat yang terjamin akan keselamatannya, tepat, sejahtera, kuat, kukuh, tenang.
4. Nyaman, yaitu rumah yang memberikan kebahagiaan bagi setiap keluarga yang bernaungdi dalamnya, serta keselamatan.

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari APBN.

Besaran alokasi anggaran dana BSPS baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru adalah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan sebagai berikut: PB maksimal Rp 30 juta dan PK maksimal Rp 15 juta.

Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh PPK. Penyaluran dilakukan setelah dana cair dari KPPN ke rekening penampungan atas nama Satker Bantuan Rumah Swadaya dan diterimanya Surat Perintah Penyaluran (SPPn).

Ketentuan dalam penarikan dana oleh penerima bantuan adalah:

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyerahkan kopi KTP dan memperlihatkan KTP asli penerima bantuan;
- Menyerahkan kopi kopi DRPB2 dan memperlihatkan DRPB2 yang sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank/Pos Penyalur;
- Menyerahkan kopi Tanda Terima bahan bangunan dan memperlihatkan bukti tanda terima bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan.
- Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
- Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang masing-masing penarikan dibuktikan dengan slip penarikan dan setoran (transfer), kopi KTP, kopi DRPB2 dan kopi Bukti Tanda Terima bahan bangunan yang selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- Penerima bantuan dapat menarik dana BPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).
- Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.
- Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.
- Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/kelurahan/ kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.

10 Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur dapat mendatangi desa tempat penerima bantuan.

### 2. Pandangan Islam tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Miskin)

Kemiskinan termasuk persoalan kemasyarakatan, yang faktor penyebabnya dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Quran tidak menetapkan kadarnya dan tidak memberi petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai fakir dan miskin mereka yang masuk golongan miskin (berpenghasilan rendah).

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu bekerja, atau hanya memiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya Menurut Djazuli (2009:221). Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak atau setengah dari orang fakir Menurut Djazuli (2009:222).

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam mengentaskan kemiskinan Islam mendahulukan langkah-langkah positif dan solusi-solusi prosedural yang realistis. Dalam Islam jalan keluarnya telah diatur



sejak lama, dengan kewajiban bekerja bagi yang mampu, shadaqah, dan zakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dan pemerintahan yang menerapkan syariat-syariat Islam, pemandangan kemiskinan yang kita saksikan bukan tidak mungkin terhapuskan sama semua.

Islam pada dasarnya adalah agama yang memiliki konsep keadilan, dengan panduan-panduan prinsip berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam berbagai hal seperti ekonomi, politik, kultural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Islam juga tentunya mengatur hal yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia.

Islam ingin menjadikan penduduk suatu kampung sebagai satu kesatuan yang saling membantu dalam keadaan lapang maupun susah. Yang kuat membantu yang lemah yang kaya membantu yang miskin. Jika bukan begitu, mereka terbebas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya dan tidak berhak menanamkan diri mereka sebagai masyarakat Islam. Sesuai dengan tuntunan moralitas Islam, setiap muslim diminta menghormati hak tetangga, termasuk dari kalangan nonmuslim. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu, kewajiban setiap individu, kewajiban masyarakat, dan kewajiban Pemerintah.

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Qur'an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga kehormatan dan harga dirinya. Kewajiban lain masyarakat tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dan sedekah wajib. Dalam Al Qur'an Surat Adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَرُومِ ۝

Artinya: Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).

Dalam konteks inilah Al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber yang sah. Sumber tersebut diantaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber diatas belum mencukupi.

Sebagai aparatur negara, pemerintah berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negaranya, melalui sumber-sumber dana yang sah. Negara berkewajiban untuk meringankan dan membantu agar dapat memudahkan beban orang-orang yang berpenghasilan rendah Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya, bagi yang tidak memiliki kemampuan material. Maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Sebagaimana pandangan didalam Al Qur'an Surat al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota-kota, adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut pandangan Islam negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Dengan demikian terciptalah solidaritas Islam dalam suatu masyarakat. Selain itu Rasulullah SAW dalam sebuah Hadist, tentang kebijakan pengeluaran pendapatan negara di distribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan harus dikelola dengan sebaik-baik agar dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang termuat dalam salah satu hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.” (H.R. Muslim).

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penguasa dipilih rakyat untuk menerapkan kebijakan sesuainya dengan pandangan Islam demi terwujudnya kemaslahatan rakyat di dunia dan akhirat. Karena itu, pertanggungjawaban seorang penguasa dalam Islam merupakan pertanggungjawaban dua dimensi, yakni dimensi dunia dan akhirat. Di akhirat, seluruh tindakannya selama memimpin akan dimintai pertanggung-jawabannya oleh Allah pencipta alam.

## 2.8 Kajian Terdahulu

**Tabel 2.1 Kajian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Hasil
1	Afifa Qomaria	Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto.	2015	Program BSPS memberikan perubahan dan dampak yang cukup baik. Program BSPS meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan meningkatkan kesejahteraan. Meski demikian masyarakat mengeluh mengenai dana bantuan yang mereka terima. Mereka merasa keberatan dengan jumlah dana yang sedikit.
	Zumrotul Mu'minin	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	2018	pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman sudah tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan program.
		Analisis	2012	Rendahnya peran serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Muhammad Maksud	Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.		masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan desa rumah layak huni berakibat pada terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tidak berjalan secara optimal.
	Wahyudi Pamelasari	Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.	2014	Tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni yang mana dilakukan dengan cara pengundian yang mana cara tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
	Dinda Gita Cahyani	Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bandar Lampung	2019	Evaluasi Pelaksanaan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandar Lampung terdapat pelaksanaannya yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan yang telah tercapai yaitu pada indikator efisiensi dan ketepatan, sedangkan pada indikator efektivitas kecukupan, pemerataan dan responsivitas hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian peneliti sendiri fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program BSPS dikhususkan kepada MBR, dan penelitian peneliti melihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu pada pelaksanaan BSPS di desa Bandur Picak dan desa Pongkai, karena kedua desa tersebut masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah mereka tergolong kepada rumah tidak layak huni.

## 2.9 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (Masri Singarimbun 2005: 33). Maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah implementasi atau pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumberdaya yang dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

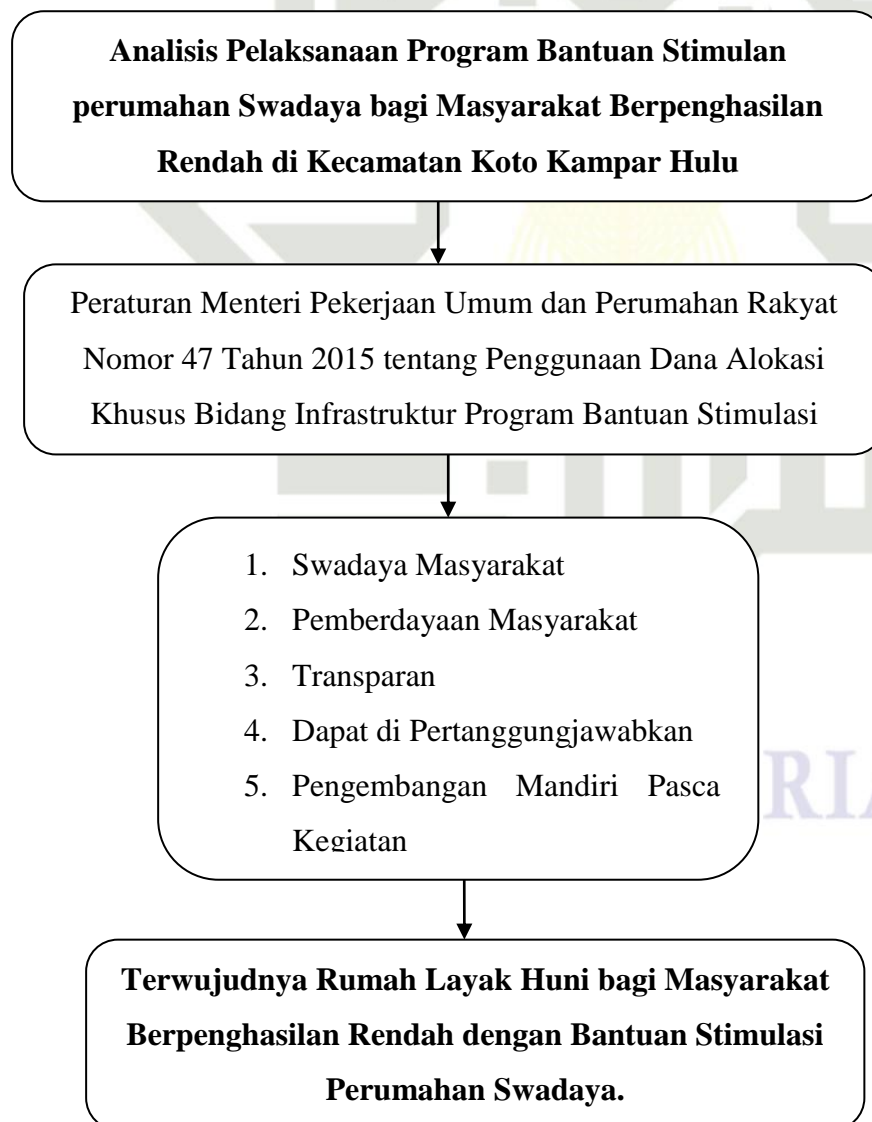
1. Diararag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararag mengumarkan dan memperbaray sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima BSPS yaitu masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. BSPS di Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan jenis Peningkatan Kualitas (PK) Rumah.
4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan disebabkan yang oleh tingkat pendapatan rendah sehingga mengakibatkan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang sosial.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1 Karangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Definisi Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

**Tabel 2.2 Definisi Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu	1. Swadaya Masyarakat	a. Diperlukan inisiatif dan upaya masyarakat baik secara sendiri atau berkelompok b. Diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana.
	2. Pemberdayaan Masyarakat	a. Masyarakat Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan b. Masyarakat membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatan c. Masyarakat Mengawasi jalannya kegiatan
	3. Transparan	a. Kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur desa serta pendamping lapangan b. Pengawasan dan evaluasi secara terbuka oleh aparatur desa, pendamping lapangan dan masyarakat
	4. Dapat Dipertanggung Jawabkan	a. Pengelolaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat penerima bantuan. b. Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan.
	5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan	a. Pengembangan mandiri pasca konstruksi setelah selesainya program BSPS b. Pengembangan dilakukan dengan inisiatif dan dengan dana dari masyarakat sendiri

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah yang dipilih atau ditetapkan sebagai penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Lokasi penelitian ini berada di dua Desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang meliputi Desa Bandur Picak, Desa Pongkai. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena Desa tersebut masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak memiliki Rumah Layak Huni, serta target dari kedua desa tersebut belum terealisasi secara maksimal.

Waktu penelitian Insyaa Allah akan dilaksanakan kurang lebih 5 bulan, mulai terhitung dari November 2020 sampai dengan April 2021.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu observasi berupa pendapat informan tentang pelaksanaan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berbasis komunikasi serta hasil wawancara dengan informan untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

Adapun bentuk data Primer yang peneliti peroleh dari tempat penelitian yaitu, jumlah KK Miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan target serta rumah yang terealisasi di desa Bandur Picak dan desa Pongkai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

#### 2. Data Sekunder

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu data yang diperoleh dari Kepala Desa Bandur Picak, Sekretaris Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Adapun bentuk data Sekunder yang peneliti peroleh dari tempat penelitian yaitu, dokumen-dokumen, foto rumah RTLH, foto bersama masyarakat sebagai penerima BSPS, proposal masyarakat dalam pengajuan DRPB2, foto rumah BSPS yang telah siap, dan lain sebagainya. Semua data tersebut didapatkan di desa Bandur Picak dan desa Pongkai terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

#### 3. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:188-198) sebagai berikut:



1. Observasi

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Dalam pengamatan ini peneliti merekam, (mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin peneliti ketahui dari pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang mengetahui pasti masalah pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Peneliti melakukan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan dan key informan.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217). Dokumentasi disini peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi berupa foto pelaksanaan BSPS dari awal pengerjaan sampai dengan selesai pembangunan rumah, serta peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan BSPS.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana peneliti memilih *Key Informan* dan informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Rais Adli, SE,Sy	Kepala Desa Bandur Picak
2	Firman	Sekretaris Desa Bandur Picak
3	Mustapa Kamal	Kepala Desa Pongkai
4	Cipto Wibowo	Kaur Pembangunan Desa Pongkai
5	Sukma Wati	Masyarakat Penerima BPS Desa Bandur Picak

Sumber: Data Olahan 2019

**Tabel 3.2 Key Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Mairizon, S.Pd	Sekretaris Desa Pongkai
2	Amrizal	Fasilitator BPS Kecamatan Koto Kampar Hulu (Pendamping)
3	Andi Susilo	Ketua Kelompok I BPS Desa Pongkai
4	Samsul Siregar	Ketua Kelompok II BPS Desa Pongkai
5	Budi	Ketua Kelompok I BPS Desa Bandur Picak

Sumber: Data Olahan 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Metode Analisa

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif. (Sugiyono, 2014:60).

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajiikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Desa Bandur Picak

##### 4.1.1 Sejarah Desa

Desa Bandur Picak adalah suatu desa yang merupakan suatu wilayah kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Desa Bandur Picak ini merupakan salah satu Desa yang merasakan dampak dari PLTA Koto Panjang, Desa Bandur Picak dulu nya hanya merupakan suatu lingkungan yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga ( RK ) yang merupakan wilayah dari Desa Sibiruang.

Pada Tahun 1996 para Tokoh Masyarakat Ninik Mamak dan masyarakat lain nya mengadakan Musyawarah yang menciptakan suatu keputusan yaitu untuk membangun sebuah desa.

Para Tokoh masyarakat berjuang dengan sungguh-sungguh selama lebih kurang 2 tahun namun perjuangan mereka tidak lah sia-siakan, pada tahun 1999 perjuangan telah membuat hasil yang memuaskan, Pemerintahan Daerah, provinsi dan Pusat menyetujui Bandur Picak menjadi sebuah Desa yang di Pimpin oleh seorang Kepala Desa yang di tunjuk langsung oleh masyarakat yaitu Bapak SYAFRIL ARIF.

Selanjutnya pada tahun 2002 masyarakat Desa Bandur Picak melakukan pemilihan Kepala Desa secara Depenitif, dan melakukan pemilihan antara 4 orang calon yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Syafril Arif
2. Madrias
3. Lazadri
4. Zahwer

Dan pemilihan dimenangkan oleh Saudara SYAFRIL ARIF. Pada pemerintahan Saudara Syafril Arif tersebut Kegiatan Desa di gunakan untuk menata dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Pada masa itu masyarakat Bandur Picak lebih kurang 75 % tergantung pada perkebunan Gambir, kemudian masyarakat secara berangsur dan mulai berfikir untuk masa depan dan berbondong-bondong untuk menciptakan pekerjaan lain yaitu bertani kebun karet dan kelapa sawit.

Selanjutnya pada tahun 2007 masyarakat Desa Bandur Picak kembali melakukan pemilihan kepala Desa seperti pemilihan kepala desa saat ini, dengan beberapa calon desa yang sebelumnya, yang mana masing-masing melakukan adanya Visi dan Misi dalam rencana pembangunan kedepan nanti nya, dan akhir nya dimenangkan oleh Saudara LAZADRI.

Pada akhir tahun 2013 di adakan pemilihan kepala Desa ke 3 dengan calon nya adalah, No urut 1. SARIBAN, no urut 2. TAMSIL, no urut 3. LAZADRI dan no urut 4. AHMAT TIBRI dengan perolehan suara adalah 55 % dari seluruh suara sah di menangkan oleh Bpk. TAMSIL.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.1.2 Demografi

##### A. Batas wilayah Desa

Letak geografi Desa bandura Picak, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Rokan Hulu (Rohul)
Sebelah Selatan	: Sibiruang
Sebelah Timur	: Tandun
Sebelah Barat	: Sumatera Barat

##### B. Batas Wilayah

1. Pemukiman masyarakat	: 7.700 m <sup>2</sup>
2. Pertanian/ Perkebunan	: 6.750 ha
3. Kebun Kas Desa	: 6.500 ha
4. Perkantoran	: 0,25 ha
5. Sekolah	: 3 ha
6. Jalan	: 12 Km
7. Lapangan bola kaki dan bola voli	: 3 ha
8. Pustu	: 0,05 ha
9. Koperasi Unit Desa	: 1 ha

##### C. Orbitas

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 24 KM
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 180 KM
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi	: 260 KM
4. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	: 1 Jam
5. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	: 4 Jam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Waktu Tempuh ke Pusat Fasilitas : 4 Jam
7. (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan) : 1 Jam

**D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

1. Kepala Keluarga : 798 KK
2. Laki-laki : 1.584 Jiwa
3. Perempuan : 1.460 Jiwa
4. Jumlah : 3.842 Jiwa

**4.1.3 Keadaan Sosial**

**A. Pendidikan**

1. PAUD/ TK : 113
2. SD : 411
3. MI : 0
4. SLTP/ MTs : 401
5. SLTA/ MA : 435
6. S1 : 42
7. S2 : 4
8. Putus Sekolah : 137
9. Buta Huruf : 0
10. D-I/ II/ III : 68

**B. Lembaga Pendidikan**

1. Gedung SD : 3 Unit di Dusun II, IV dan V
2. Gedung PAUD : 1 Unit di Dusun IV
3. Gedung TK : 1 Unit di Dusun IV

4. MDTA : 2 Unit di Dusun IV

#### 4.1.4 Keadaan Ekonomi

##### A. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani/Pekebun	: 1.159 orang
2. Pedagang	: 210 orang
3. PNS	: 21 orang
4. Tukang	: 32 orang
5. Guru	: 71 orang
6. Bidan/ Perawat	: 16 orang
7. Polri	: 3 orang
8. Pesiunan	: 2 orang
9. Sopir/ Angkutan	: 133 orang
10. Buruh	: 2.098 orang
11. Jasa persewaan	: 12 orang
12. Swasta	: 2 orang
13. Nelayan	: 108 orang

#### 4.1.5 Kondisi Pemeritahan Desa

##### A. Pembagian Wilayah Desa

Desa Bandur Picak terbagi ke dalam 5 dusun terdiri dari:

1. Dusun I	: Jumlah 5 RW dan 5 RT
2. Dusun II	: Jumlah 6 RW dan 6 RT
3. Dusun III	: Jumlah 5 RW dan 5 RT
4. Dusun IV	: Jumlah 4 RW 4 RT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Dusun V : Jumlah 6 RW 6 RT

## B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

### 1. Lembaga Pemerintahan Desa

**Tabel 4.1 Data Lembaga Pemerintah Desa Bandur Picak**

No.	Aparatur Desa	Jumlah (orang)
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Perangkat Desa	13 orang
4.	Staff	5 Orang
5.	Operator ADD	0

### 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 9 Orang

### 3. Lembaga Kemasyarakatan

**Tabel 4.2 Data Lembaga Kemasyarakatan**

No	Lembaga Kemasyarakatan	Kelompok
1.	LPMD	13 Kelompok
2.	PKK	10 Kelompok
3.	Posyandu	2 Kelompok
4.	Pengajian	5 Kelompok
5.	Arisan	3 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	-
7.	Kelompok Tani	4 Kelompok
8.	Gapoktan	5 Kelompok
9.	Karang Taruna	-
10.	Arisan Masyarakat	-
11.	Ormas/ LSM	8 Kelompok
12.	Lain-lain	-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Organisasi dan Tata Laksana

Struktur organisasi desa Koto Tuo berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 tahun 2015 adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha
  - b. Kepala Urusan Keuangan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan
5. Kepala seksi Pelayanan
6. Kepala Dusun

### D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 Tahun 2015

#### 1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

**2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Menyalurkan Aspirasi
- 2) Merencanakan APBDes



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mengawasi Pemerintahan Desa

**3. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### 4. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi penyusunan program dan kebijakan pemerintahan desa dalam rangka pembangunan desa, penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan, penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Kepala Seksi**

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- a. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

**6. Kepala Dusun**

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

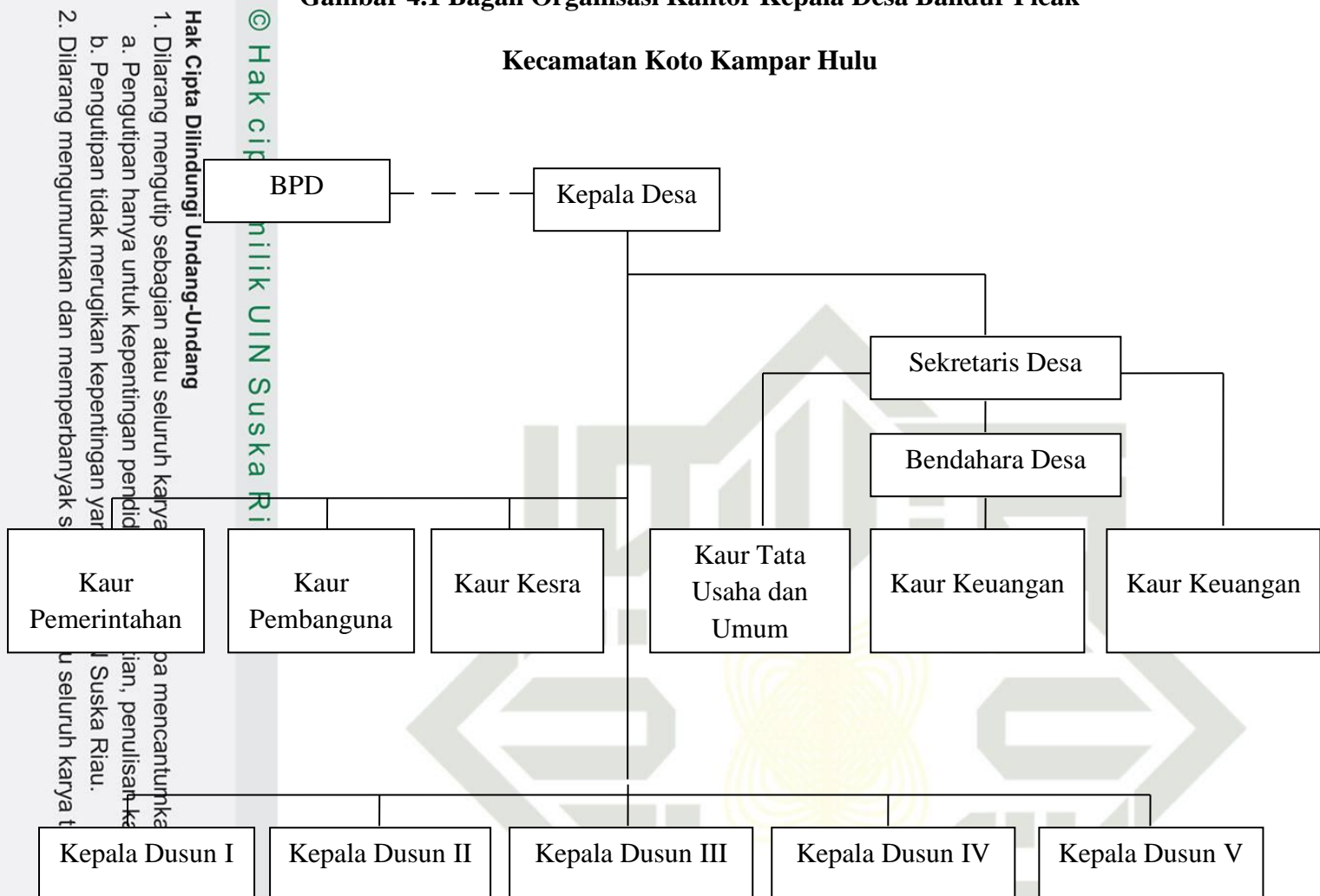
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Desa Bandur Picak di Kecamatan Koto Kampar Hulu masih terdapat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), adapun jumlah MBR di desa Bandur Picak yaitu berjumlah 318 KK, sedangkan jumlah rumah Tidak Layak Huni yang berada pada desa bandura Picak yaitu berjumlah 152, serta yang terealisasi dari target yang dimiliki oleh desa Bandur Picak yaitu 52 rumah. Desa Bandur Picak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tahun 2019 dengan pengajuan nama yaitu pada tahun 2018 oleh aparat desa bersama dengan tim pelaksana dari tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.

**Gambar 4.1 Bagan Organisasi Kantor Kepala Desa Bandur Picak**

**Kecamatan Koto Kampar Hulu**



Sumber: Kantor Kepala Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu 2019



## 4.2 Desa Pongkai

### 4.2.1 Sejarah Desa

Desa Pongkai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Desa Pongkai merupakan salah satu dampak dari kegiatan pembuatan PLTA Koto Panjang yang dipindahkan oleh pemerintah Kabupaten kampar melalui SK Bupati Kabupaten Kampar pada tahun 1996. Pada saat itu jumlah penduduk desa pongkai kurang lebih 757 jiwa. Namun dimasa itu pemerintah memberikan tantangan pada desa Pongkai, karena desa Pongkai terletak sangat terpencil dibandingkan dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Desa Pongkai dahulunya berpola-pola, terdapat tiga pola. Pola Pertama, Pindah Bebas yaitu diberikan pilihan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memilih tempatnya, sehingga berpencar-pencarlah mereka, salah satunya di pasir pengaraian, Tanjung Pinang, dimana disana terdapat namanya desa Pongkai. Pola Kedua, Transmigrasi dahulu berada di selatan desa Sibiruang yang dikelola oleh salah PT yang berada di desa Tersebut. Pola kedua juga diberikan rumah bagi masyarakat, dan juga pemerintah memberikan jaduk untuk masyarakat menghasilkan uang. Sedangkan Pola Ketiga, Peer, dimana pola ini pemerintah juga memberikan rumah, bercocok tanam, jaduk, dan lain-lain.

Kondisi desa Pongkai sampai saat ini makin berkembang dan jumlah penduduknya juga selalu meingkat setiap tahunnya. Meskipun desa Pongkai cukup jauh dan terpencil dari desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Koto kampar Hulu, namun desa Pongkai selalu meningkatkan eksistensinya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan selalu mengarah pada tahap pembangunan yang lebih baik dengan bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.2 Demografi

#### A. Batas wilayah Desa

Letak geografi Desa Pongkai, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Padasa
Sebelah Selatan	: Tabing
Sebelah Timur	: Sibiruang
Sebelah Barat	: Gunung Malelo

#### B. Batas Wilayah

10. Pemukiman masyarakat	: 3.200 m <sup>2</sup>
11. Pertanian/ Perkebunan	: 4.534 ha
12. Kebun Kas Desa	: 1.842 ha
13. Perkantoran	: 0,18 ha
14. Sekolah	: 1 ha
15. Jalan	: 8 Km
16. Lapangan bola kaki dan bola voli	: 2 ha
17. Pustu	: 0,02 ha
18. Koperasi Unit Desa	: 1 ha

#### C. Orbitas

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 18 KM
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 179 KM
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi	: 257 KM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 40 Menit
5. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 3 Jam
6. Waktu Tempuh ke Pusat Fasilitas : 3 Jam
7. (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan) : 1 Jam

**D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

1. Kepala Keluarga : 376 KK
2. Laki-laki : 672 Jiwa
3. Perempuan : 845 Jiwa
4. Jumlah : 1.893 Jiwa

**4.2.3 Keadaan Sosial**

**A. Pendidikan**

1. PAUD/ TK : 95
2. SD : 345
3. MI : 0
4. SLTP/ MTs : 312
5. SLTA/ MA : 156
6. S1 : 35
7. S2 : 0
8. Putus Sekolah : 124
9. Buta Huruf : 6
10. D-I/ II/ III : 47

**B. Lembaga Pendidikan**

1. Gedung SD : 1 Unit di Dusun II
2. Gedung PAUD : 1 Unit di Dusun III

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gedung TK : 1 Unit di Dusun I
4. MDTA : 2 Unit di Dusun IV

#### 4.2.4 Keadaan Ekonomi

Jenis Pekerjaan :

1. Petani/Pekebun : 321 orang
2. Pedagang : 112 orang
3. PNS : 6 orang
4. Tukang : 32 orang
5. Guru : 54 orang
6. Bidan/ Perawat : 8 orang
7. Polri : 1 orang
8. Pesiunan : 0
9. Sopir/ Angkutan : 87 orang
10. Buruh : 1.78 orang
11. Jasa persewaan : 5 orang
12. Swasta : 1 orang
13. Nelayan : 65 oran

#### 4.2.5 Kondisi Pemeritahan Desa

##### A. Pembagian Wilayah Desa

Desa Bandur Picak terbagi ke dalam 5 dusun terdiri dari:

1. Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II : Jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III : Jumlah 2 RW dan 4 RT



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dusun IV : Jumlah 2 RW dan 4 RT

**B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

1. Lembaga Pemerintahan Desa

**Tabel 4.3 Data Lembaga Pemerintah Desa Pongkai**

No.	Aparatur Desa	Jumlah (orang)
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Perangkat Desa	11 orang
4.	Staff	10 Orang
5.	Operator ADD	0

2. Lembaga Kemasyarakatan

**Tabel 4.4 Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Pongkai**

No	Lembaga Kemasyarakatan	Kelompok
1.	LPMD	9 Kelompok
2.	PKK	7 Kelompok
3.	Posyandu	2 Kelompok
4.	Pengajian	3 Kelompok
5.	Arisan	2 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	-
7.	Kelompok Tani	4 Kelompok
8.	Gapoktan	2 Kelompok
9.	Karang Taruna	-
10.	Arisan Masyarakat	-
11.	Ormas/ LSM	6 Kelompok
12.	Lain-lain	-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Organisasi dan Tata Laksana**

Struktur organisasi desa Koto Tuo berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 tahun 2015 adalah:

7. Kepala Desa
8. Sekretaris Desa
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha
  - b. Kepala Urusan Keuangan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan
9. Kepala Seksi Pemerintahan
10. Kepala Seksi Kesejahteraan
11. Kepala seksi Pelayanan
12. Kepala Dusun

### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 Tahun 2015

#### **1. Kepala Desa**

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

## 2. Badan Permusyawaratan Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Menyalurkan Aspirasi
- 2) Merencanakan APBDes
- 3) Mengawasi Pemerintahan Desa

### 3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
  - 4) keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**4. Kepala Urusan**

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi penyusunan program dan kebijakan pemerintahan desa dalam rangka pembangunan desa, penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan, penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan.

**5. Kepala Seksi**

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- a. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.



## 6. Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

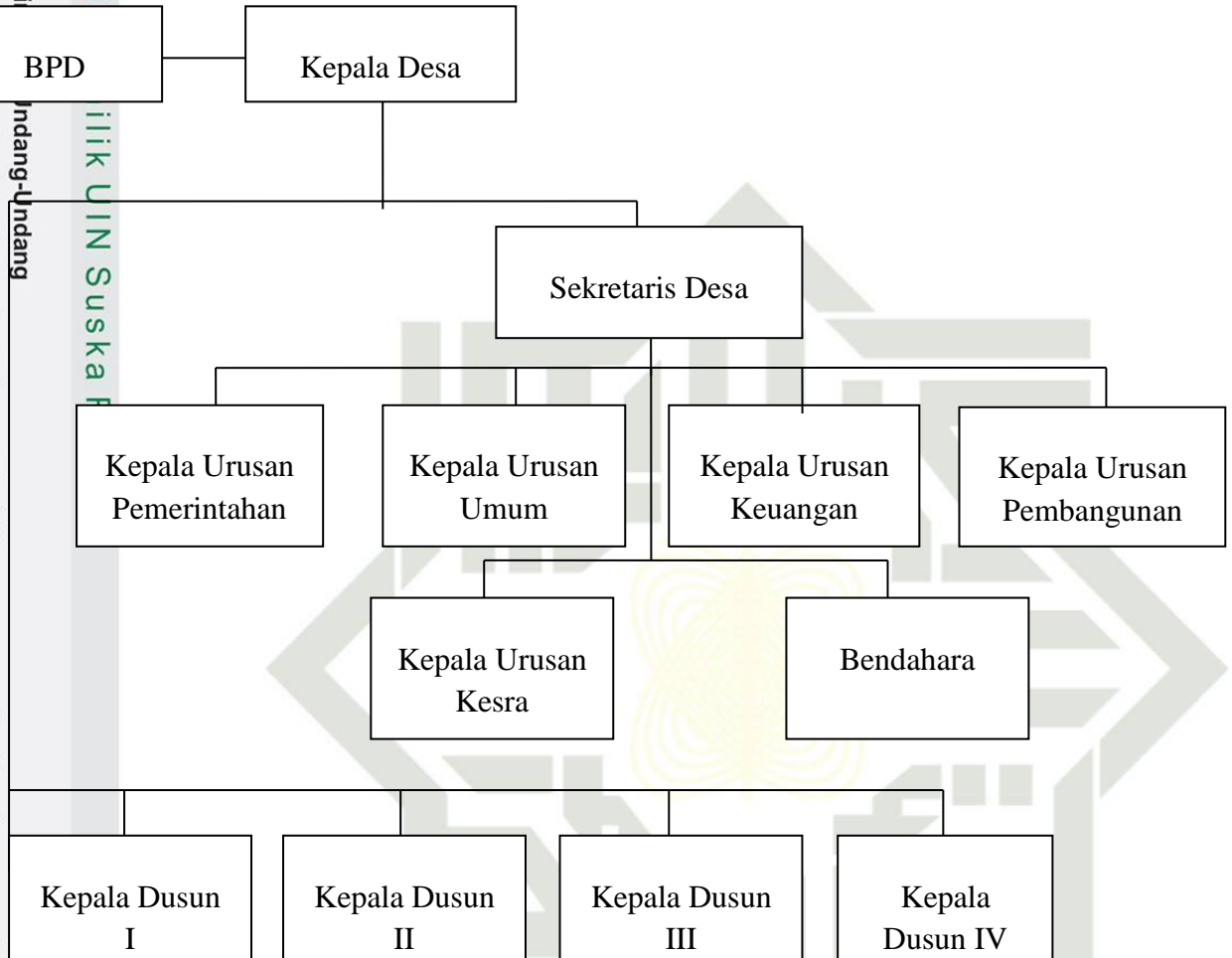
- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Desa Pongkai di Kecamatan Koto Kampar Hulu masih terdapat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), adapun jumlah MBR di desa Pongkai yaitu berjumlah 135 KK, sedangkan jumlah rumah Tidak Layak Huni yang berada pada desa Pongkai yaitu berjumlah 105, serta yang terealisasi dari target yang dimiliki oleh desa Bandur Picak yaitu 32 rumah. Desa Pongkai menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tahun 2019 dengan pengajuan nama yaitu pada tahun 2018 oleh aparat desa bersama dengan tim pelaksana dari tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.2 Bagan Organisasi Desa Pongkai  
Kecamatan Koto Kampar Hulu**



Sumber: kantor Kepala desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu 2019

Hak Cipta Dili  
1. Dilarang m  
a. Pengutipan m  
b. Pengutipan m

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu khususnya di Desa Bandur Picak dan Desa Pongkai sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan menggunakan prinsip-prinsip pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Swadaya yang disiapkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Masyarakat juga diikut sertakan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan serta pengawasan. Kegiatan pembangunan rumah dilaksanakan secara transparansi, dapat dipertanggung jawabkan serta masyarakat mampu melakukan pengembangan pasca kegiatan BSPS.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yaitu masih terdapat masyarakat yang menolak menerima BSPS karena tidak mampu untuk melakukan swadaya, terdapat beberapa masyarakat yang tergolong lanjut usia sehingga terbatas dalam segi tenaga membangun rumah, tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat sehingga mereka kesulitan dalam menyiapkan manajemen administrasi, serta adanya program bantuan rumah lainnya sehingga mereka tidak bisa menerima BSPS lagi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6.2 Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat miskin yang menjadi target dalam pelaksanaan bantuan ini masih ada yang tidak mampu untuk melakukan swadaya, untuk itu pemerintah desa perlu membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan swadaya untuk bisa meningkatkan rumahnya supaya layak huni.
2. Perlu adanya dukungan dan motivasi dari kepala desa dan masyarakat sekitar dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Masyarakat harus lebih menerapkan nilai gotong royong dalam membantu melaksanakan pembangunan rumah, karena masyarakat memiliki keterbatasan dalam swadaya tenaga kerja.
3. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan swadaya secara materil untuk menyewa tukang maupun keahlian dalam melaksanakan pembangunan rumah, maka perlu adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk pembayaran tukang.
4. Pemerintah desa perlu melakukan verifikasi dan identifikasi dengan teliti kepada masyarakat yang akan menerima bantuan, agar tidak terjadi tumpang tindih program bantuan pembangunan rumah setelah dilakukan verifikasi.
5. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seharusnya tidak terfokus pada satu wilayah tertentu, agar tidak terjadi kesenjangan pembagunan pada wilayah lain yang tidak menerima bantuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abini, Riska. 2019. *Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bagong, Suyanto. 1996. *Perangkat Kemiskinan Promblema dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan*. Jakarta : Aditya Media
- Berita Tanggal 12 Januari 2019 10:26 WIB, yang Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pupr-menarget-jumlah-rumah-tak-layak-huni-di2019-hanya-1-9-juta-1547259057487265439>, pada Hari Rabu, 8 April, Pukul 13:47 WIB).
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edi, Soeharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosisal dan pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hasibuan, Malayu SP. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nggra, Adi Fajar. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Di Kota Serang". Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: JDIH Kementerian PUPR. 2016.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/ 2018*. Jakarta: JDIH Kementerian PUPR. 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang, *Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. 2011



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang  
*Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014*. 4  
April 2018. Jember.

Pelatihan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

Rapita, Mestesa. 2019. *Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rsrth) Pada Masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)*. Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Demensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Slamet Margono. 1984. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Interaksi Majalah Ilmu dan Budaya Volume 1 No 1.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Zulkarnain. "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan". Jurnal Katalogis. Nomor 10. Volume 4. (Oktober 2016).





## PANDUAN WAWANCARA

### ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HUU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kriteria masyarakat sebagai penerima BSPS?
2. Apa saja persyaratan masyarakat sebagai penerima BSPS?
3. Apa padoman pemerintah desa dalam melaksanakan BSPS?
4. Siapa saja yang terlibat pada pelaksanaan BSPS?
5. Bagaimana alur pemberian BSPS kepada masyarakat?
6. Bagaimana tahap seleksi pemberian BSPS?
7. Bagaimana inisiatif dan upaya masyarakat dalam melakukan swadaya?
8. Apakah masyarakat sudah mempersiapkan komitmen serta kesiapannya dalam melakukan swadaya sebagai penerima BSPS tersebut?
9. Apa saja bentuk swadaya masyarakat?
10. Bagaimana pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat?
11. Apa saja bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh tim BSPS kepada masyarakat?
12. Apa yang dilakukan oleh tim BSPS setelah melakukan sosialisasi?
13. Apakah masyarakat mampu merencanakan kegiatan pembangunan rumah melalui bantuan tersebut?
14. Apakah aparat desa ikut membantu dalam menyiapkan persyaratan?
15. Bagaimana cara aparat desa dalam memberikan arahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Siapakah yang menunjuk ketua kelompok BSPS?
17. Berapa orang dalam satu kelompok?
18. Siapakah yang memilih toko bangunan?
19. Apakah masyarakat mampu untuk membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatan?
20. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengawasi jalannya kegiatan?
21. Bagaimana kegiatan program BSPS dilaksanakan?
22. Siapa sajakah yang terlibat dalam mengevaluasi dari kegiatan pelaksanaan program BSPS?
23. Berapa kali evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan program BSPS?
24. Berapa kali pengawasan dilakukan oleh pendamping selama pelaksanaan program BSPS?
25. Apakah aparat desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan kepada masyarakat penerima bantuan?
26. Bagaimana aparat desa dalam memepertanggungjawabkan program BSPS kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan?
27. Apa alasan masyarakat yang telah mengajukan diri dan tidak lulus sebagai penerima BSPS?
28. Apakah masyarakat mampu melakukan pengembangan mandiri pasca kegiatan?
29. Bagaimana masyarakat dalam melakukan pengembangan inisiatif dari dana mereka sendiri?
30. Apakah bapak diberikan kebebasan dalam membangun rumah setelah BSPS selesai?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31. Apakah bapak mampu melakukan pengembangan dengan dana sendiri?
32. Pembangunan apa saja yang bapak lanjutkan setelah kegiatan BSPS selesai?
33. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BSPS?
34. Kapan program BSPS berlangsung di desa ini?
35. Siapakah yang berhak sebagai penerima Program BSPS?
36. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut?
37. Berapa persen pemerintah terlibat dalam pelaksanaan BSPS?
38. Apakah ada masyarakat yang menerima bantuan sosial ganda?





## TRANSKIP WAWANCARA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### 1. Wawancara dengan Kepala Desa Bandur Picak Bapak Rais Adli

*“Pelaksanaan BSPS ini, masyarakat sebagai penerima bantuan di desa Bandur Picak mempunyai inisiatif dan upaya dalam mengikuti dan melaksanakan pembangunan rumah, secara sendiri mereka mampu dan berkelompok pun mereka kompak, ketua dari kelompok selalu mengkoordinir anggotanya serta saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan, karena program ini mengedepankan swadaya masyarakat dan dorongan dari pemerintah. Oleh karena itu masyarakat memang dipaksa mandiri dengan inisiatif dan upaya baik itu secara sendiri ataupun berkelompok.” (Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 9 Februari 2021).”*

*“Pelaksanaan BSPS di desa Bandur Picak dilaksanakan oleh swadaya masyarakat, apabila dalam pembangunan rumah terdapat kekurangan bahan, maka masyarakat membeli sendiri menggunakan dana sendiri, karena program ini memang mengedepankan swadaya dari masyarakat, termasuk juga upah tukang yang kurang, maka masyarakat juga menggunakan dana sendiri, dan mereka mampu dan bersedia atas itu. (Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 9 Februari 2021)”*

*“Perencanaan kegiatan di desa Bandur Picak dilakukan oleh badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh kepala desa beserta dengan staf, masyarakat Calon Penerima Bantuan, tokoh masyarakat, RT serta RW, dalam rapat tersebut diberikan penjelasan kepada masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan rumah baik itu persyaratan ataupun penyusunan proposal. (Wawancara dengan bapak, Rais Adli, 10 Februari 2021).”*

*“Beberapa masyarakat saya yang lanjut usia, berusia lebih dari 58 tahun dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan rumah, diberikan uang dari dana BSPS sebesar 15% dari nilai bantuan untuk biaya upah tukang. Jika bantuannya adalah kategori berat yaitu Rp 15.000.000,00 maka dia dapat bantuan uang untuk biaya upah tukang sebesar Rp 2.250.000,00. Penerima bantuan ini rata-rata adalah seorang janda.” (Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 11 Februari 2021)”*

*“Pelaksanaan BSPS di desa Bandur Picak kami mengikut sertakan semua masyarakat dalam hal informasi, dana, usulan nama, pemilihan took dan*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan lainnya, hal ini kami lakukan agar semua masyarakat tau semua hal yang berkaitan dengan BSPS, dan barulah pelaksanaan BSPS dapat terlaksana dengan baik.” (**Wawancara dengan Bapak Rais Adli selaku Kepala Desa Bandur Picak, 12 Februari 2021).**”

“Evaluasi yang dilaksanakan di desa Bandur Picak berjenjang dimulai dari Tim BSPS pusat, Tim BSPS Kabupaten Kampar, setelah itu Tim Kecamatan, lalu Pemerintah Desa, dan masyarakat juga pastinya terlibat. evaluasi tersebut diadakan di aula kantor desa, semua tim tersebut datang untuk men cek rumah-rumah warga yang menerima bantuan dan mendengarkan keluhan dan kendala mereka.” (**Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 12 februari 2021).**

“Calon penerima bantuan yang ditetapkan menjadi penerima bantuan Insyaa Allah telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, Calon Penerima Bantuan juga sudah diidentifikasi dan diverifikasi secara langsung kerumahnya, kami dari pemerintahan desa ikut membantu tim teknis dari Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan identifikasi dan verifikasi tersebut, jadi bisa kita pertanggungjawabkan. (**Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 12 Februari 2021)**”

“Memang masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan pengembangan setelah pembangunan BSPS telah selesai, tapi dengan syarat tidak merubah struktur induk pembangunan dari BSPS, di Bandur Picak dari yang saya lihat mereka sudah mampu melakukan pengembangan pasca konstruksi.” (**Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 11 Februari 2021).**

“Program ini kan tidak dibantu oleh pemerintah 100% namun dalam bentuk stimulan ataupun dorongan, sehingga yang paling utama berperan besar itu adalah masyarakat, karna itulah diperlukan swadaya dari masyarakat baik itu dana ataupun tenaga kerja gotong royong dari masyarakat, yang terjadi pada pelaksanaan BSPS ini, masyarakat masih ada yang kurang mampu dalam melakukan swadaya. Namun jikalau masyarakat memiliki niat yang kuat untuk mengikuti Program BSPS ini dan paham bagaimana pelaksanaannya Insyaa Allah akan berhasil. (**Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 11 Februari 2021).**

“Masyarakat di desa Bandur Picak ada sekitar 5 masyarakat dalam kategori lnajut usia, masyarakat ini memiliki terbatasan tenaga kerja yang akan membangun rumahnya, dan rumah keeratannya cukup jauh dari rumahnya, dan keluarga terdekat juga tidak bisa membantu karena mereka bekerja dikebun ada yang berjualan dipasar, sehingga mereka harus mengeluarkan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

uang lebih untuk membayar upah tukang.” (**Wawancara dengan bapak Rais Adli, 11 Februari 2021**).

“Kendala dalam pelaksanaan di Desa Bandur Picak ini salah satunya yaitu karena masyarakat kami sudah pernah mendapatkan bantuan dari kementerian sosial berupa Bantuan Bahan Bangunan (BBR).” (**Wawancara dengan Bapak Rais Adli, 110 Februari 2021**).

### 2. Wawancara dengan Kepala Desa Pongkai Bapak Mustapa Kamal

“Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sangat memerlukan inisiatif dan upaya masyarakat secara sendiri atau kelompok. Di desa Pongkai kami bersama dengan pendamping dari kabupaten di kantor desa ini, membagi mereka ke dalam kelompok yang terdiri 15-20 orang perkelompok, mereka bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir dan mereka saling membantu jikalau ada anggota kelompoknya kesusahan. Secara sendiri mereka juga inisiatif untuk mengikuti program BSPS dan mengupayakan swadaya mereka untuk melaksanakan pembangunan rumah BSPS untuk terwujudnya rumah mereka selesai cepat dan layak huni.” (**Wawancara dengan Bapak Mustapa Kamal, 8 Februari 2021**).

“Kami pemerintah desa membantu bapak Andi Susilo beserta seluruh ketua kelompok untuk buat proposal bantuan. Proposalnya sendiri bersamaan dengan kelengkapan berkas yang dikumpulkan pada saat sosialisasi. Sedangkan yang belum sempat terkumpul, pak Andi Susilo langsung ke rumah warga tersebut untuk mengambil kelengkapan berkasnya. Selama pembuatan proposal, ada Fasilitator Lapangan yaitu bapak Amrizal beserta dengan tim yang mendampingi kami, membantu memeriksa proposal yang kami buat dan menyarankan hal-hal yang belum lengkap.” (**Wawancara dengan Bapak Mustapa Kamal, 10 Februari 2021**).

“Pelaksanaan BSPS di desa Pongkai, kami selalu memberikan informasi terkait bantuan ini agar diketahui oleh seluruh warga, hal ini kami melakukan sosialisai kepada warga di balai desa, dihadiri oleh ketua RT, RW, Kadus, Fasilitator Lapangan, Tim Teknis, aparat desa, dan seluruh masyarakat. Masyarakat juga mengetahui dan dapat melihat langsung anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan rumah. (**Wawancara dengan Bapak Mustapa Kamal, Kepala desa pongkai, 12 Februari 2021**).

“Masyarakat penerima BSPS di desa pongkai sesuai dengan peraturan menteri PUPR nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus, dan berdasarkan Prinsip-prinsip pelaksanaan BSPS, bahwasanya





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan pasca konstruksi, asalkan jangan merubah struktur induk bangunan, jadi yang boleh itu seperti dapur, teras, ataupun pembangunan lainnya.” (**Wawancara dengan bapak Mustapa Kamal, 9 Februari 2021**).

“Untuk pelaksanaan BSPS di desa pongkai tidak dapat terealisasi semuanya dari target yang kami ajukan, karena ada sekitar 73 yang gagal dan dari 73 tersebut terdapat 37 masyarakat yang sudah pernah menerima BBR, sehingga ini menjadi kendala, karena mereka tidak bisa menerima BSPS”. (**Wawancara dengan Bapak Mustapa Kamal, 11 Februari 2021**).

### 3. Wawancara dengan Sekretaris Desa Bandur Picak Bapak Firman

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini tidak semua masyarakat yang diajukan ketingkat kabupaten semuanya lulus, namun ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai calon penerima bantuan, selain itu rumah-rumah warga disurvei langsung oleh tim teknis Kabupaten Kampar bersama dengan Fasilitator Lapangan, dan aparat desa, untuk memastikan apakah masyarakat tersebut berhak untuk menerima bantuan tersebut. Untuk Desa Bandur picak sendiri jumlah yang menerima bantuan yaitu sebanyak 52 rumah ” (**Wawancara dengan bapak Firman, 11 Februari 2021**).

### 4. Wawancara dengan Sekretaris Desa Pongkai Bapak Mairizon

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan memang sangat diperlukan komitmen dari masyarakat sebagai penerima BSPS, karena jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan sedikit, oleh karena masyarakat diperlukan untuk mampu menambah apa-apa saja yang kurang, baik itu dana ataupun bahan material untuk pembangunan rumah layak huni. Masyarakat desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu bersedia untuk melakukan swadaya, dan memiliki komitmen yang kuat dalam penyelesaian rumah layak huni.” (**Wawancara dengan Bapak Mairizon, 9 Januari 2021**).

“Desa pongkai melakukan rembug warga dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar, serta fasilitator lapangan dihadiri oleh pemerintah desa, masyarakat penerima bantuan, tokoh masyarakat, RT dan juga RW. (**Wawancara dengan bapak, Mairizon, 9 Februari 2021**).”

“Calon penerima bantuan yang kami ajukan tidak menutup kemungkinan tidak akan diterima seluruhnya sebagai penerima bantuan. Terdapat syarat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat calon penerima bantuan. Berkas-berkas yang dikirim tentunya telah melewati tahapan seleksi, rumah-rumah mereka (calon penerima bantuan) disurvei. Survei yang dilakukan dari Tim Teknis Kabupaten Kampar di bantu dengan Tenaga Fasilitator Lapangan masing-masing desa. Survei ini ditujukan untuk mengecek kebenaran secara langsung, apakah mereka layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Untuk Desa Pongkai, ada 32 unit rumah yang terima bantuan”. (Wawancara dengan Bapak Mairizon, 10 Februari 2021).

“Seperti yang telah saya jelaskan diawal tadi bahwasanya bantuan ini merupakan dorongan dari pemerintah dengan menggunakan kekuatan ataupun kesanggupan dari masyarakat tersebut. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk abahan material bangunan bukan uang tunai, dimana dananya paling banyak 15% dari total dana yang mereka terima. Tapi penerima seperti ini harus memenuhi syarat terlebih dahulu, syaratnya adalah penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo), cacat permanen dan janda tua yang tinggal sendiri, dana BPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% dari nilai bantuan. Bagi penerima bantuan yang memenuhi kategori tersebut dibuatkan DRPB2 khusus yang memisahkan antara dana yang akan ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan dan yang akan ditarik secara tunai oleh penerima bantuan dari rekeningnya. Di pongkai sedniri terdapat 3 orang yang lanjut usia dengan usia rata-rata diatas 60 tahun. (Wawancara dengan Bapak Mairizon, 10 Februari 2021).”

“Dalam pelaksanaan BPS ini kami berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Desa Pongkai ini untuk masyarakat yang menerima bantuan di tahun 2019, itu kami mengajukan dan mengirim nama-namanya di tahun 2018. Dan pembangunan rumah dilaksanakan di tahun 2019.” (Wawancara dengan bapak Mairizon, 11 Februari 2021).

“Masyarakat di Desa Bandur Picak ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu dalam melakukan swadaya dan menolak bantuan ini karena keterbatasan dana, padahal kami dari pemerintahan desa sudah memberikan arahan dan motivasi agar masyarakat mau dan bersemangat dalam mengikuti bantuan ini, namun kami pun dari aparat tidak dapat memaksa jikalau mereka memang tidak mampu.” (Wawancara dengan bapak Mairizon, 11 Februari 2021).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Seperti yang kita ketahui bersama di desa pongkai ini tidak ada took bangunan yang lengkap menjual bahan material bangunan, jadi kami membeli di desa sibirung desa tetangga, dan jaraknya lumayan jauh dan untuk sampai kesini harus melewati semak dan perkebunan orang, dan jalannya cukup jelek, jadi bahan bangunan telat untuk sampai pada rumah warga. Selain itu juga terdapat warga kami yang lanjut usia sebagai penerima bantuan ini sehingga ia terbatas dalam melakukan swadya tenaga dan dia hanya mengharpkan bantuan dari tetangga dan anggota kelompok lainnya sebagai penerima bantuan.” (Wawancara dengan Bapak Mairizon, 9 Februari 2021).

#### Wawancara dengan Fasilitator (Pendamping) Kecamatan Koto Kampar Hulu Bapak Amrizal

“Bentuk keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah di Desa Bandur picak dan pongkai paling banyak adalah dengan menyiapkan sejumlah dana untuk membayar gaji tukang, kemudian juga membeli kekurangan bahan bangunan yang kurang saat dilaksanakan pengerjaan pembangunan rumah. Dalam hal berupa uang besarnya bervariasi mulai dari 1 juta sampai ada yang lebih dari 7 juta, dan masyarakat juga menabung dengan membuat jula-jula dengan tetangga untuk membantu suami mereka. (Wawancara dengan bapak, Amrizal, 7 Februari 2021).

“Saya Pendamping BSPS Kecamatan Koto Kampar Hulu ikut berpartisipasi dan membantu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam merencanakan kegiatan ini, saya dan tim membimbing dan memberikan arahan kepada masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan BSPS, tahapan pelaksanaan, kriteria dan persyaratan penerima bantuan dan fakta integritas, dimana masyarakat nantinya akan diminta untuk menyiapkan proposal yang akan dibantu oleh tim fasilitator lapangan dan dibantu juga oleh aparat pemerintahan desa.” (Wawancara dengan bapak Amrizal, 15 Februari 2021).

“Kami mensurvey rumah-rumah calon warga penerima bantuan. Rumah-rumah ini telah di data oleh tim dari desa sesuai dengan syarat dan kriteria penerima bantuan, namun kami harus melihat langsung keadaan mereka termasuk kondisi rumah mereka. Calon-calun penerima bantuan ini kemudian diinput dalam proposal pengajuan dan diajukan kepada Tim Teknis Kabupaten Kampar . Selanjutnya dari sana diseleksi lagi di Tingkat Provinsi. Hasil dari seleksi ditingkat Propinsi ini ditetapkanlah sebagai penerima bantuan dan disampaikan ke Tingkat Kabupaten dalam bentuk SK





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerima bantuan.” (*Wawancara dengan Bapak Amrizal, 7 Februari 2021*).”

“Pemberdayaan pada tahap perencanaan, masyarakat diikutsertakan dalam pemilihan toko/penyedia bahan bangunan. Dengan teknis ketua kelompok penerima bantuan dibantu dengan anggota melakukan survey ke minimal 3 toko penyedia bahan bangunan, kegiatan ini di laksanakan per kelompok. Kemudian diadakan rembug oleh ketua kelompok penerima bantuan beserta anggota untuk memilih toko penyedia bangunan dengan harga terendah dan memiliki izin, SIUP/ SITU, TDP, dan NPWP. Toko tersebut akan dijadikan penyalur kebutuhan bahan bangunan. Tahapan penyaluran dana dalam bentuk bahan yang melalui dua tahap dan dibuktikan dengan pembuatan laporan. Jadi ketua kelompok dibantu anggota menyusun bahanbahan bangunan apa yang anggota butuhkan untuk membangun rumah masing-masing anggota sesuai dengan jumlah batuan dana yang diterima, lalu kebutuhan bahan bangunan dimasukan dalam DRPB2. Disinilah peran dari ketua kelompok bersama anggota untuk menentukan apa bentuk swadaya masyarakat selain bahan rumah yang ditanggung oleh dana BSPS. (*Wawancara dengan bapak Amrizal, 7 Februari 2021*)”.

“Masyarakat berperan dalam mengawasi jalannya kegiatan dari awal pelaksanan hingga selesai. Ketua kelompok penerima bantuan harus memastikan semua bahan material yang sudah di pesan dalam DPRB2 telah diterima oleh masyarakat, juga memastikan seberapa jauh perkembangan pembangunan rumah dari 0% -100%. Kami juga membantu dalam proses pengawasan itu”. (*Wawancara dengan Tenaga Fasilitator Lapangan, Bapak Amrizal, 7 Februari 2021*)”

“yang terlibat dalam Pelaksanaan BSPS ini yaitu, Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten, Pendamping atau Fasilitator Lapangan, Pemerintahan Desa, serta Masyarakat. Evaluasi setiap kegiatan kami selalu melibatkan masyarakat, evaluasi kami adakan di kantor desa dengan melakukan musyawarah evaluasi dilakukan dua kali sesuai dengan tahap pelaksanaan BSPS yaitu dua tahap, saya beserta dengan parat desa mewawancarai secara langsung apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi masyarakat untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Evaluasinya sendiri terdiri dari pengerjaan tahap awal yaitu 0%-30% dan tahap 30%-100%. (*Wawancara dengan bapak Amrizal selaku Fasilitator Lapangan Kecamatan Koto Kampar Hulu, 7 Februari 2021*)

“Setelah SK ditetapkan maka langkah selanjutnya yaitu pencairan dana BSPS yang dilakukan oleh PPK. Karena Desa Pongkai tidak lebih dari 100



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KK penerima bantuan, oleh karena itu dana yang dicairkan oleh PPK dari KPPN langsung diberikan kepada masyarakat penerima bantuan. Dan tim teknis serta kami pendamping atau fasilitator lapangan secara langsung datang kerumah warga untuk memberikan uang tersebut, tanpa melalui Bank/Pos Penyalur.” (Wawancara dengan Bapak Amrizal, 9 Februari 2021).”

“Penyaluran dana BSPS saya dan tim fasilitator lapangan memberikan langsung kepada masyarakat penerima bantuan, dan terdapat dua tahap penyaluran dana, tahap I 50% dan tahap II 50% dari dana bantuan yang diberikan oleh PPK dari KPPN dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Wawancara dengan Bapak Amrizal selaku Fasilitator Lapangan, 7 Februari 2021).”

“Setelah pembangunan selesai tepat pada waktunya, penerima BSPS yang dibantu oleh saya sendiri sebagai Fasilitator lapangan bersama dengan tim akan membuat laporan akhir tentang penggunaan dana beserta foto rumah yang kan diserahkan kepada Tim teknis Kabupaten Kampar, untuk dijadikan laporan akhir, selain penerima TFL, Tim Teknis juga harus memberikan laporan akhir pertanggungjawaban atas BSPS kepada PPK dan berlanjut kepada pusat.” (Wawancara dengan Bapak Amrizal, 7 Februari 2021).”

“Beberapa masyarakat penerima bantuan kurang paham mengenai penyusunan DRPB2 dan pelaporan progres pembangunan-nya, jadi saya dan ketua kelompok dibantu dengan pemerintah desa yang membantu pembuatannya, kami susun DRPB2-nya sesuai dengan apa yang mereka akan gunakan dan yang telah mereka gunakan”. (Wawancara dengan Bapak Amrizal, 7 Februari 2021)

#### 6 Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Cipto Wibowo

“Untuk pelaksanaan BSPS di desa pongkai tidak dapat terealisasi semuanya dari target yang kami ajukan, karena ada sekitar 73 yang gagal dan dari 73 tersebut terdapat 37 masyarakat yang sudah pernah menerima BBR, sehingga ini menjadi kendala, karena mereka tidak bisa menerima BSPS”. (Wawancara dengan Bapak Cipto Wibowo, 11 Februari 2021).

#### 7 Wawancara dengan Ketua Kelompok BSPS Desa Bandur Picak Bapak Budi

“Dalam pelaksanaan program BSPS ini swadaya kami sangat diutamakan , karena kalau ada kekurangan kami harus siap untuk menambah. Swadaya yang kami siapkan yaitu, pasir dimana kami bisa mengambil pasir di sungai





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tidak jauh dari rumah kami, yang akan kami gunakan ketika ada kekurangan pasir. Untuk upah tukang rata-rata kami tidak menyewa tukang lain, akan tetapi kami langsung yang membangun rumah dengan dibantu oleh kerabat terdekat kami. Kami siap dan menerima untuk melakukan swadaya.” (**Wawancara dengan bapak, Budi 10 Februari 2021).**”

“Saya selalu mengecek bahwa bahan bangunan telah diterima oleh anggota kelompok saya, saya juga selalu melakukan kontrol ke setiap rumah anggota untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan rumah, karena pencairan dana dilaksanakan secara dua tahap. Jadi saya harus mendorong anggota untuk selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Saya juga sering menanyakan apa saja kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga bisa kita cari solusinya bersama. Kegiatan ini juga selalu dibantu oleh pak kades, tenaga fasilitator lapangan, dan juga tim teknis dari kabupaten.” (**Wawancara dengan Penerima Bantuan BPS, Bapak Budi 9 Februari 2021).**

“Kalau pendamping cukup sering datang kesini (rumah warga penerima bantuan) untuk melihat dan memantau jalannya kegiatan BPS dari awal pembangunan sampai dengan selesai. Dalam satu bulan bisa 4 atau 6 kali pak Amrizal datang untuk melihat perkembangan proses pelaksanaan pembangunan rumah. (**Wawancara dengan bapak Budi selaku Ketua Kelompok BPS Desa Bandur Picak, 12 Februari 2021).**

“Setelah mendapatkan dana bantuan, semua pembangunan diserahkan kepada kami anggota kelompok, semua keluhan dan hambatan akan kami langsung beri tahu pendamping dan aparat desa. semua pelaksanaan dan pencairan dana Alhamdulillah lancar.” **Wawancara dengan bapak Budi, 11 Februari 2021).**”

#### 8 Wawancara dengan Ketua Kelompok BPS Desa Pongkai Bapak Samsul Siregar

“Saya sebagai ketua kelompok BPS yang ditunjuk oleh anggota tim saya dan juga dibantu oleh aparat desa, dalam pelaksanaan BPS ini memang menekankan pada swadaya kami sebagai penerima bantuan, swadaya kami disini bermacam-macam ada berupa tabungan, bahan material, ada juga yang menjual hewan ternak untuk tambahan dana, dan masih banyak lagi. Saya sendiri bentuk swadaya saya yaitu bahan material bangunan, saya dan istri saya sudah mengangsur membeli semen, batu, pasir, saya juga memiliki sejumlah tabungan yang kami gunakan untuk membayar upah tukang. (**Wawancara dengan Bapak Samsul Siregar, 9 Februari 2021).**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*“Setelah pembangunan BSPS selesai masyarakat memang diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan rumah mereka. Saya sendiri melakukan pengembangan pembangunan dapur dan teras karena ketika pembangunan BSPS belum sempat terlaksana.” (Wawancara dengan Bapak, Samsul Siregar, 9 Februari 2021).*

#### 9 Wawancara dengan Ketua Kelompok BSPS Desa Pongkai Bapak Andi Susilo

*“Kami diikutsertakan dalam menentukan toko penyedia bahan bangunan, kami mencari toko yang memiliki izin SIUP/SITU, TDP, dan NPWP. Saya dibantu anggota kelompok juga selalu berkoordinasi untuk mendata apa saja bahan bangunan yang dibutuhkan anggota untuk dimasukkan dalam DRPBB anggota dan juga kelompok, kami juga membandingkan harga antara took satu dengan harga took yang lainnya, demi mendapatkan harga yang ekonomis, kami dibantu dan didampingi oleh Fasilitator Lapangan.” (Wawancara dengan Bapak Andi Susilo, 9 Februari 2021).*

*“Kami dirikan rumah ini, menggunakan bantuan yang beri oleh pemerintah. Tapi pelaksanaan pembangunannya kami mencari tukang untuk mempercepat proses pengerjaannya. Tukangnya juga berasal dari masyarakat sekitar tempat tinggal saya dan juga dari kerabat terdekat, dan anggota masyarakat sebagai penerima bantuan, bersamaan dengan masyarakat yang lainnya belum bergotong royong untuk membantu rumah warga yang kekurangan tenaga kerja”. (Wawancara dengan Andi Susilo, 9 Februari 2021).*

*“Saya sebagai ketua kelompok yang dipercayai untuk menkoordinir semua anggota kelompok saya dalam mengawasi jalannya kegiatan dari awal sampai selesai, saya selalu memastikan kegiatan pembangunan rumah berjalan dengan lancar, dan saya juga menanyakan apa saja keluhan ataupun kendala yang dialami, saya memeriksa semua anggota kelompok saya, untuk memastikan bahwa tahapan pengerjaan sudah selesai atau belum, sehingga bahan material tahap selanjutnya bisa diantar atau diberikan ke masyarakat, serta saya juga memastikan bahan bangunan sudah sampai ditangan masyarakat atau belum.” (Wawancara dengan Bapak Andi Susilo, 11 Februari 2021).”*

*“Pelaksanaan BSPS memang dilakukan secara terbuka kepada kami seluruh masyarakat, kami juga ikut rapat yang diadakan beberapa kali di aula kantor desa, dan kami mengetahui secara jelas tentang informasi, dana, dan yang lainnya terkait BSPS, tindakan tersebut kami sebagai masyarakat puas dan merasa sangat dibimbing dalam mengikuti program BSPS ini”. (Wawancara*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

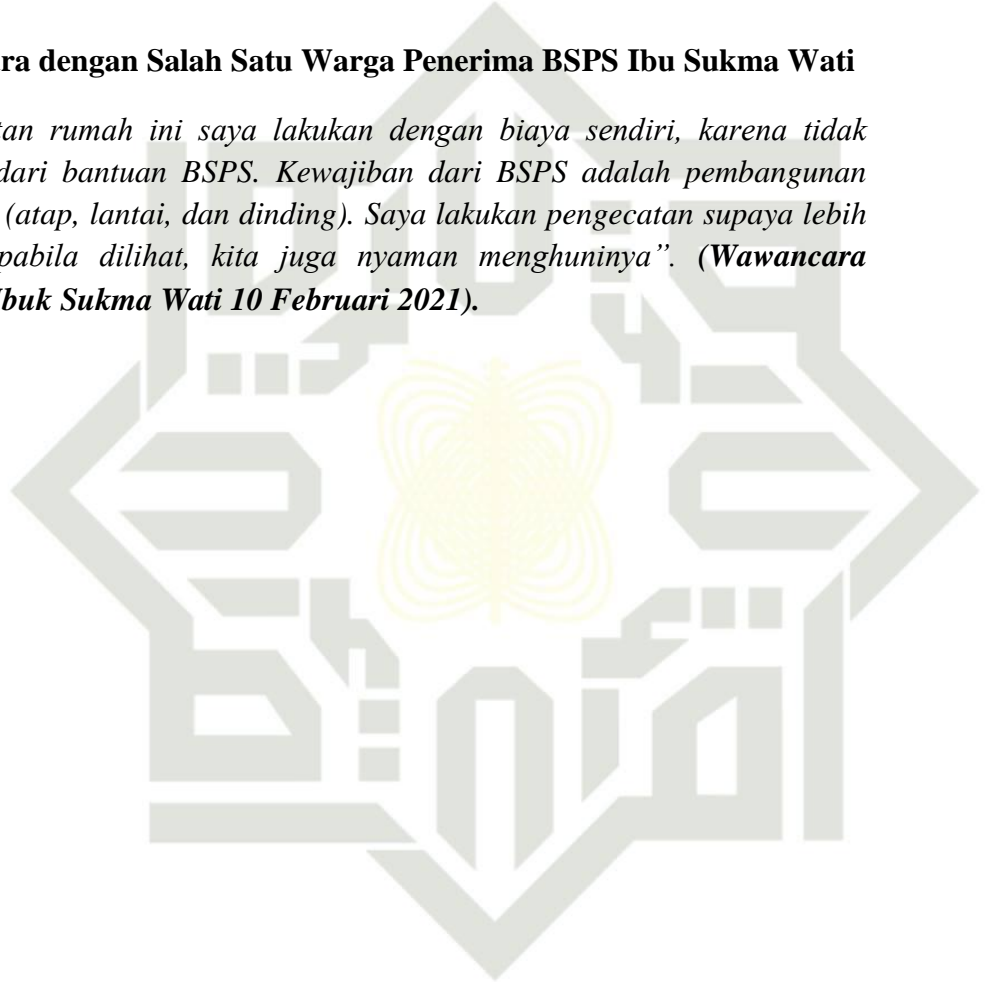
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan Bapak Andi Susilo Ketua Ketua Kelompok BSPS, 12 Februari 2021.”

“Kami menerima dana bantuan secara langsung diberikan oleh pendamping kepada kami, dan datang secara langsung kerumah kami, memang ada dua tahap dana yang diberikan, tahap I 50% dan tahap II 50 % juga, dalam penyaluran dana yang diberikan kepada kami Alhamdulillah lancar, dan berjalan dengan baik.” ( Wawancara dengan Bapak Andi Susilo ketua kelompok BSPS, 9 Februari 2021).”

**10. Wawancara dengan Salah Satu Warga Penerima BSPS Ibu Sukma Wati**

“Pengecatan rumah ini saya lakukan dengan biaya sendiri, karena tidak berasal dari bantuan BSPS. Kewajiban dari BSPS adalah pembangunan ALADIN (atap, lantai, dan dinding). Saya lakukan pengecatan supaya lebih bagus apabila dilihat, kita juga nyaman menghuninya”. (Wawancara dengan Ibuk Sukma Wati 10 Februari 2021).



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak Firman Selaku Sekretaris  
Desa Bandur Picak (11 Februari 2021)**



**Wawancara dengan Bapak Mairizon Sekretaris  
Desa Pongkai (9 Februari 2021)**

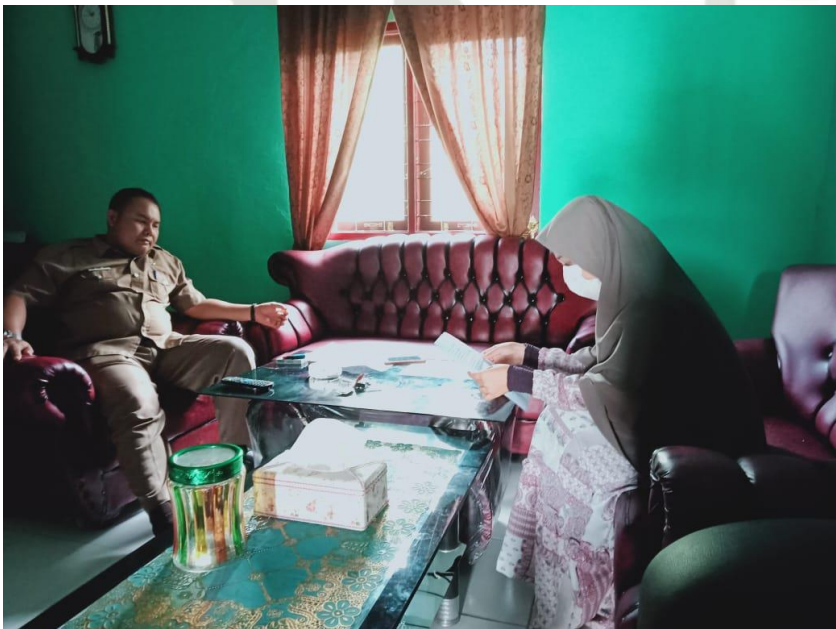


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak Rais Adli Kepala Desa  
Bandur Picak ( 10 februari 2021)**



**Wawancara bersama Bapak Mustapa Kamal Kepala  
Desa Pongkai ( 8 Februari 2021)**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Bapak Amrizal Selaku Fasilitator  
BSPS Kecamatan Koto Kampar Hulu**



**Wawancara bersama Bapak Andi Susilo selaku Ketua  
Kelompok I BSPS Desa Pongkai ( 12 Februari 2021)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak Samsul Siregar selaku Ketua Kelompok II Desa Pongkai (9 Februari 2021)**



**Wawancara bersama bapak Andi Selaku Ketua Kelompok BSPS Desa Bandur Picak ( 11 Februari 2021)**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak Cipto Wibowo Selaku  
Kaur Pembangunan Desa Pongkai ( 9 Februari 2021)**



**Wawancara Bersama Ibuk Sukma Wati Selaku Masyarakat  
Penerima BSPP ( 11 Februari 2021)**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Salah Satu Foto Rumah Masyarakat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2019**



**Toko Bangunan yang dipilih Oleh Masyarakat Penerima BSPS**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Penyaluran Dana Kepada Masyarakat Tahap I**



**Rembug Warga di Kantor Kepala Desa**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Salah satu Bentuk Swadaya Masyarakat yang dipersiapkan  
Untuk Mengikuti Program BSPS**



**Penyaluran Bahan Material Bangunan yang Telah  
dibeli Oleh Masyarakat dari Toko**





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/229/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 18 Januari 2021 M  
4 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada  
Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Sitri Soniati  
NIM : 11775200061  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Koto Kampar Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/143/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Januari 2021 M  
29 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sitri Soniati  
NIM. : 11775200061  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Pelaksanaan Program Bantu Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp)  
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Koto Kampar  
Hulu". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan  
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Drs. H. M. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37778  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VIIPP.00.9/143/2021 Tanggal 18 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

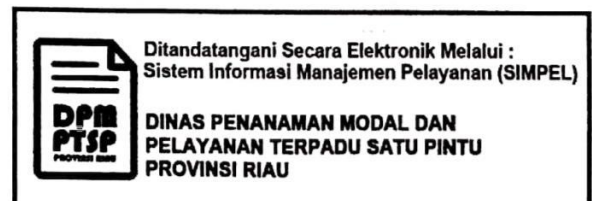
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>STRI SONIATI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11775200061</b>  |
| 3. Program Studi     | : | <b>ILMU ADMINISTRASI NEGARA</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>   |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>1. KANTOR KEPALA DESA BANDUR PICAK<br/>2. KANTOR KEPALA DESA PONGKAI</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/188

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37778 tanggal 18 Januari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **SITRI SONIATI**
2. NIM : 11775200061
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**
8. Lokasi : 1.KANTOR KEPALA DESA BANDUR PICAK  
2.KANTOR KEPALA DESA PONGKAI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prä riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 5 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Koto Kampar Hulu di Tanjung.
2. Kepala Desa Bandur Picak di Tanjung.
3. Kepala Desa Pongkai di Tanjung.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
5. Yang Bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
**KANTOR KEPALA DESA BANDUR PICAK**

Kode Pos 28453

Nonor : 140/BP-KTKH/2021/07.  
Lamp : -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri (UIN Suska) Riau  
Di  
Pekanbaru

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu`alaikum Wr. Wb**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 18 Januari 2021 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa :

Nama : **STRI SONIATI**  
NPM : 11775200061  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Riset : "ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH" dengan wilayah Riset Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Maka dari itu Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan melaksanakan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan Akademik.
3. Waktu Izin Pengambilan Data dilakukan selama 5 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat Izin Riset ini di keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan bila mana perlu.

DIKELUARKAN DI : BANDUR PICAK  
PADA TANGGA : 08 FEBRUARI 2020



KEPALA DESA BANDUR PICAK

RAIS ADLI, SE. Sy





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KEPALA DESA PONGKAI**

JL. LINGKAR MASJID AL – HUDA No. 01 DESA PONGKAI KODE  
POS 28453

desapongkai@gmail.com. HP. 085278408294 / 082285832005

**BALASAN REKOMENDASI**

Pemerintah Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu, setelah membaca surat Rekomendasi Permohonan Riset dari: **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37778 Tanggal 11 Januari 2021**, dengan ini memberikan Izin Riset kepada:

Nama : **SITRI SONIATI**  
NIM / KTP : 11775200061  
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
Jenjang : **S1**  
Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN  
STIMULAN PERUMAHAN SWADYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

Berdasarkan nama Mahasiswa di atas benar melakukan penelitian di Pemerintahan Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu dan telah diberi izin.

Demikian surat balasan Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat di pertanggungjawabkan di mana perlu.

Pongkai, 08 Februari 2021  
Kepala Desa Pongkai  
  
**MUSTAPAKAMAL**